



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



REGIONAL CHIEF ECONOMIST QUARTERLY REPORT KAJIAN FISKAL REGIONAL

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TRIWULAN III TAHUN 2025





TIM PENYUSUN

Pembina

Mohammad Dody Fachrudin
Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera
Barat

Penanggung Jawab

Bayu Setiawan Yuniarto
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran II

Editor

Abdullah Al Mizan
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIA

Kontributor

Abdullah Al Mizan
Solikhin
Rino Bagus Haryanto
Ery Setyawan
Lyssa Zulya Zalyra
Meilisa Kusumawati
Rezi Eka Putra
Farid Fahlevi

Design dan Layout

Meilisa Kusumawati



KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita semua*

Penyusunan *RCE Quarterly Report* (Kajian Fiskal Regional) merupakan aktivitas telaah makro sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di daerah. Sebagai salah satu output strategis dari pelaksanaan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun ***RCE Quarterly Report (Kajian Fiskal Regional) Triwulan III Tahun 2025***.

Kajian Fiskal Regional ini mengulas mengenai dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat lingkup Provinsi Sumatera Barat selama triwulan III tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan *RCE Quarterly Report* (Kajian Fiskal Regional) Triwulan III Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan yang kami hadapi. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan kajian ini.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan kajian ini. Kami berharap kajian ini mampu memberikan manfaat dan khazanah baru bagi para pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, dan terlebih bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

***"Tingkatkan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Padang, 28 November 2025

Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin
Kepala Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Sumatera Barat



EXECUTIVE SUMMARY

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro dan Kesejahteraan

- Ekonomi Sumatera Barat pada triwulan III-2025 tumbuh sebesar 3,36 persen (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 yang tercatat tumbuh sebesar 3,94 persen (yoy).
- Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Barat pada empat kabupaten/kota pengukur tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat, tercatat bahwa terjadi inflasi (yoy) pada bulan Juli sebesar 2,19 persen, bulan Agustus sebesar 2,89 persen, dan bulan September sebesar 4,22 persen.
- NTP Sumatera Barat pada Juli 2025 tercatat sebesar 127,94, meningkat 3,70 persen pada Agustus 2025 menjadi 132,67 dan terjadi penurunan 1,88 persen menjadi 130,17 pada September 2025. Sementara itu, NTN Sumatera Barat pada triwulan III-2025 secara berturut-turut sebesar 102,67 pada Juli, meningkat menjadi 105,40 pada Agustus, dan kembali meningkat pada September 2025 menjadi 108,79.
- Pada tahun 2025, IPM Provinsi Sumatera Barat mencapai 77,27, meningkat 1,10 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 76,43.
- Jumlah penduduk miskin Sumatera Barat mengalami penurunan dari 5,42 persen atau 315,43 ribu jiwa pada September 2024 menjadi 312,35 ribu jiwa (5,35 persen) pada Maret 2025.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat pada Agustus 2025 mengalami penurunan menjadi 5,62 persen dibanding Februari 2025 yang sebesar 5,69 persen.

Pengaruh Fiskal di Daerah (APBN dan APBD)

- Kinerja APBN s.d. Triwulan III -2025 menunjukkan Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp5,98 triliun atau mencapai 77,86 persen dari target. Di sisi lain, Belanja Negara mencapai Rp22,55 triliun atau mencapai 70,09 persen dari pagu.
- Pendapatan Negara di Sumatera Barat didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang berkontribusi hingga 74,29 persen, sementara sisanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 25,71 persen.
- Realisasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp7,07 triliun atau mencapai 59,12 persen dari pagu anggaran. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 18,59 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 disebabkan oleh implementasi kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
- Realisasi TKD pada triwulan III-2025 mencapai Rp15,48 triliun atau 76,57 persen dari pagu serta turun 3,01 persen dibandingkan triwulan II-2024, yang disebabkan oleh peningkatan alokasi DAK Non Fisik.
- Pendapatan Transfer berkontribusi sebesar 77,65 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan PAD memberikan kontribusi sebesar 22,29 persen.
- Belanja Pegawai merupakan bagian terbesar dari komposisi Belanja Daerah dengan realisasi mencapai Rp9,48 triliun, dengan porsi mencapai 58,50 persen dari total Belanja Daerah.

EXECUTIVE SUMMARY

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

- Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Barat hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian positif dalam perluasan cakupan dan peningkatan partisipasi satuan pendidikan, namun masih menghadapi sejumlah isu strategis dalam implementasinya.
- Berdasarkan data dari empat daerah utama pelaksanaan program yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya, terlihat bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok makanan dan minuman di seluruh wilayah tersebut menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan adanya tekanan permintaan (demand-pull inflation) yang bersumber dari pelaksanaan Program MBG
- Program MBG yang menysasar ribuan peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA menciptakan peningkatan permintaan terhadap bahan pangan lokal, khususnya produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan seperti beras, sayur-mayur, telur, daging ayam, dan ikan. Dorongan permintaan tersebut menjadi insentif bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produksi dan distribusi, yang secara langsung berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.
- Salah satu permasalahan utama berkaitan dengan kesiapan rantai pasok bahan pangan lokal, terutama di daerah yang jauh dari pusat distribusi. Peningkatan permintaan bahan pokok seperti beras, telur, dan daging ayam yang terjadi secara simultan di beberapa kabupaten/kota menyebabkan terjadinya tekanan harga dan gangguan pasokan di pasar tradisional. Kondisi ini berimplikasi pada naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok makanan dan minuman di sejumlah daerah, terutama sejak bulan Juli hingga September 2025.

Pengaruh DAU dan DAK Fisik terhadap Capaian SPM Pemda

- Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara TKD (khususnya DAU dan DAK Fisik) dengan capaian SPM di Sumatera Barat bersifat kompleks. Secara deskriptif, capaian SPM melonjak tajam pada 2021–2024, namun analisis panel menegaskan bahwa DAU per kapita riil berperan lebih kuat terhadap indeks SPM komposit, terutama setelah reformasi DAU *specific grant*, sementara pengaruh DAK Fisik belum tampak signifikan pada tingkat agregat karena dampaknya lebih sektoral dan berjangka panjang.
- Efektivitas TKD sangat ditentukan oleh karakteristik fiskal, sosial-ekonomi, dan kelembagaan tiap daerah, sehingga kebijakan TKD yang seragam berisiko mengabaikan keragaman konteks lokal, khususnya bagi daerah miskin, berkapasitas fiskal lemah, dan sangat bergantung pada transfer (sekitar 70 persen pendapatan).
- Diperlukan pendekatan TKD yang berdiferensiasi berbasis risiko, kapasitas fiskal, kemiskinan, tipologi wilayah, dan kinerja SPM, diiringi penguatan penganggaran berbasis kinerja dan kualitas belanja di daerah agar DAU dan DAK Fisik benar-benar terhubung dengan target SPM.
- Bagi Kanwil DJPb Sumatera Barat, temuan ini mempertegas peran TREFA untuk memperkuat dialog kebijakan dengan pemda, membangun early warning system atas risiko penurunan layanan dasar, dan memberi masukan teknis ke pusat.

DASHBOARD

KAJIAN FISKAL REGIONAL

TRIWULAN III TAHUN 2025



REALISASI PENERIMAAN NEGARA

S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025



Pajak Dalam Negeri
Rp2,79 T

Pajak Perdagangan Internasional
Rp1,66 T

PNBP BLU
Rp1,13 T

PNBP Lainnya
Rp411,31 M



REALISASI BELANJA NEGARA

S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025



Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pegawai
Rp4,23 T

Belanja Barang
Rp2,39 T

Belanja Modal
Rp416,48 M

Belanja Bansos
Rp29,40 M

Belanja Transfer ke Daerah

Dana Alokasi Umum
Rp11,10 T

Dana Bagi Hasil
Rp425 M

Dana Insentif Fiskal
Rp113,81 M

DAK Non Fisik
Rp2,75 T

Dana Desa
Rp893 M

DAK Fisik
Rp199 M



REALISASI PENERIMAAN DAERAH

S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025



Peran APBN dan APBD sebagai **instrumen countercyclical** dalam mengendalikan perekonomian dapat berjalan secara efektif.



REALISASI BELANJA DAERAH

S.D. TRIWULAN III TAHUN 2025



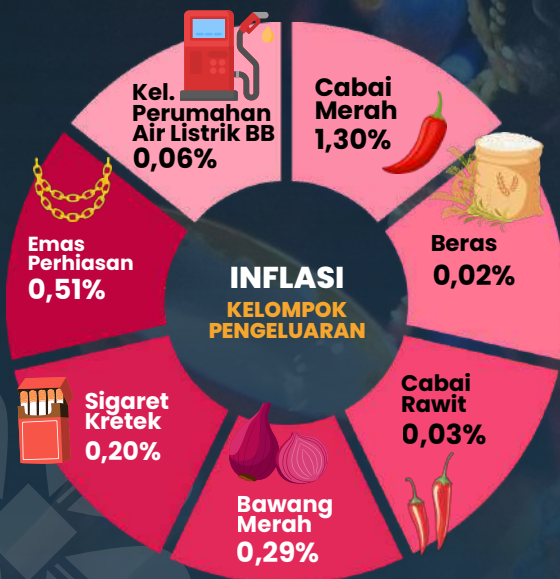
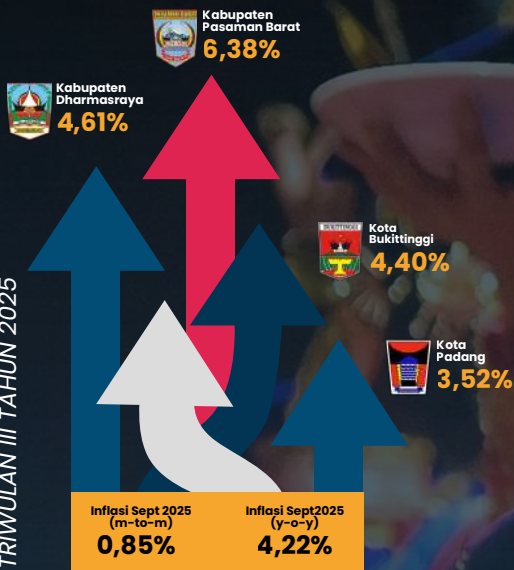
DASHBOARD

KAJIAN FISKAL REGIONAL

TRIWULAN III TAHUN 2025

INFLASI

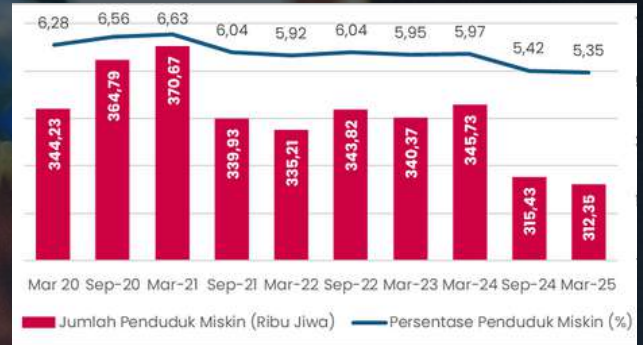
TRIWULAN III TAHUN 2025



TINGKAT KEMISKINAN (MARET 2025)



Persentase Penduduk Miskin
Maret 2025
5,35%



GINI RATIO (MARET 2025)

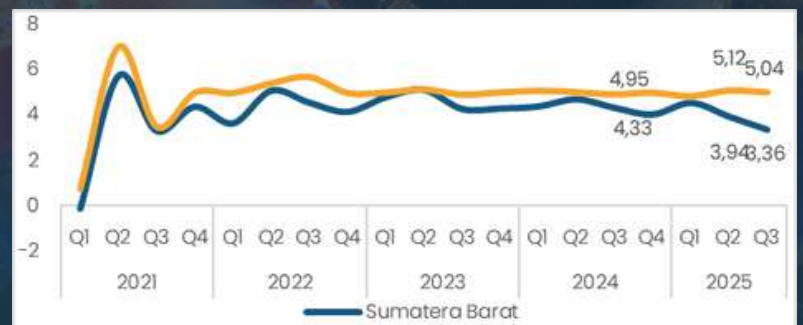


Gini Ratio
Maret 2025
0,282



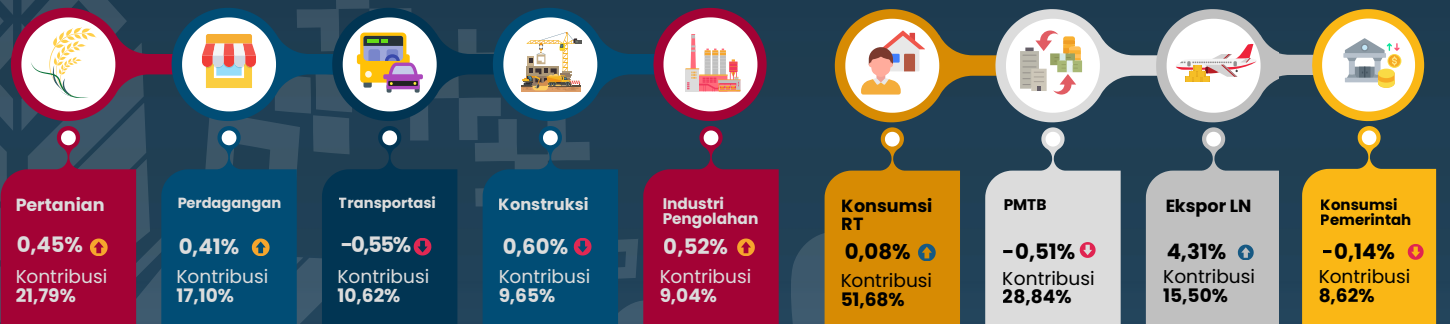
PERTUMBUHAN EKONOMI

PERIODE 2021 - TRIWULAN III TAHUN 2025



STRUKTUR PDRB

TRIWULAN III TAHUN 2025



LAPANGAN USAHA

PENGELUARAN

DAFTAR ISI

BAB I – ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1	Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	1
1.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
1.1.2	Kontribusi Fiskal terhadap Pembentukan PDRB.....	4
1.1.3	Tingkat Inflasi	6
1.1.4	Statistik Perbankan Regional	8
1.2	Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan dan Pembangunan.....	8
1.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP).....	8
1.2.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	9
1.2.3	Indikator Pembangunan Manusia	10
1.2.4	Tingkat Kemiskinan.....	11
1.2.5	Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran	13

BAB II – ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1.	Pelaksanaan APBN	14
2.1.1	Pendapatan Negara.....	15
2.1.2	Belanja Negara.....	20
2.1.3	Surplus/Defisit.....	26
2.1.4	Prognosis APBN	26
2.2.	Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi.....	27
2.2.1	Pendapatan Daerah	28
2.2.2	Belanja Daerah.....	29
2.2.3	Surplus/Defisit APBD	31
2.2.4	Pembiayaan Daerah.....	31
2.2.5	Prognosis APBD	32
2.2.6	Analisis Tingkat Kemandirian Daerah.....	32
2.2.7	Rasio Pajak Daerah (<i>Local Tax Ratio</i>)	33

BAB III – ANALISIS TEMATIK

3.1	Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)	34
3.1.1	Strategi Pelaksanaan Kegiatan MBG	34

3.1.2	Standar Gizi MBG.....	34
3.1.3	Pelaksanaan Program MBG Provinsi Sumatera Barat.....	35
3.1.4	Dampak Indikasi Awal Program MBG.....	35
3.1.5	Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Program MBG Provinsi Sumatera Barat	39
3.2	Analisis Pengaruh DAU dan DAK Fisik terhadap Capaian Standar Pelayanan Minimal.....	40
3.2.1	Pendahuluan	40
3.2.2	Rumusan Masalah	40
3.2.3	Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat.....	41
3.2.4	Perkembangan DAU dan DAK Fisik Kabupaten/Kota 2021–2024.....	42
3.2.5	Profil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Sumatera Barat.....	43
3.2.6	Kondisi Sosial-Ekonomi: Kemiskinan dan PDRB per Kapita.....	44
3.2.7	Gambaran Umum Hasil Empiris	46
3.2.8	Hasil Estimasi Model Panel Utama.....	47
3.2.9	Perubahan Pengaruh DAU sebelum dan Sesudah DAU <i>Specific Grant</i> ..	49
3.2.10	Peran Karakteristik Fiskal dan Sosial-Ekonomi Daerah	49
3.2.11	Analisis Sensitivitas	50
3.2.12	Diskusi dan Implikasi Kebijakan	51
BAB IV – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA		56

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 I-Account APBN Wilayah Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2024-2025	14
Tabel II. 2 Sepuluh Bagian Anggaran dengan Pagu Belanja Tertinggi	22
Tabel II. 3 Realisasi Transfer ke Daerah Triwulan III 2025	25
Tabel II. 4 Prognosis APBN Wilayah Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2025	27
Tabel II. 5 I-Account APBD Konsolidasi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2024 dan 2025	27
Tabel II. 6 Prognosis APBD Wilayah Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025	32
Tabel III. 1 Rujukan Angka Kecukupan Gizi Harian Menurut Kelompok Umur Sasaran	34
Tabel III. 2 Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Jumlah Penduduk, PDRB per Kapita, dan Tingkat Kemiskinan, Tahun 2024	42
Tabel III. 3 Rata-rata DAU dan DAK Fisik per Kapita Riil Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Menurut Tahun, 2021-2024	42
Tabel III. 4 Daerah dengan Capaian Indeks SPM Komposit Rata-rata di Sumatera Barat 2021-2024	43
Tabel III. 5 Rata-rata Capaian SPM per Urusan Wajib Menurut Tahun di Sumatera Barat, 2021-2024	46
Tabel III. 6 Hasil Estimasi Model Panel Pengaruh DAU dan DAK Fisik terhadap Indeks SPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 2021-2024	48

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

Grafik I. 1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional per Triwulan, Tahun 2021 s.d. Triwulan III-2025.....	1
Grafik I. 2 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2024.....	2
Grafik I. 3 Share Pengeluaran Dengan Kontribusi Besar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	2
Grafik I. 4 Share Lapangan Usaha dengan Kontribusi Besar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	4
Grafik I. 5 Pengeluaran Fiskal dan Share Terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2020 s.d. Triwulan III-2025	5
Grafik I. 6 Belanja Pemerintah Menurut Jenis, Tahun 2023 s.d. Triwulan III-2025.....	5
Grafik I. 7 Tren Inflasi yoy Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2023 s.d. Triwulan III-2025.....	6
Grafik I. 8 Tren Inflasi mtm Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2023 s.d. Triwulan III- 2025.....	7
Grafik I. 9 Perkembangan NTP, It, Ib di Sumatera Barat Tahun 2024-TW III 2025.....	9
Grafik I. 10 Perkembangan NTN Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023-2025.....	10
Grafik I. 11 Perkembangan IPM Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	10
Grafik I. 12 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	11
Grafik I. 13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat 2020-2025.....	12
Grafik I. 14 Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Sumatera, Maret 2025	12
Grafik I. 15 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat....	13
Grafik II. 1 Realisasi dan Komposisi Pendapatan Negara Triwulan III Tahun 2025.....	16
Grafik II. 2 Penerimaan Perpajakan Triwulan III Tahun 2024-2025.....	16
Grafik II. 3 Penerimaan Pajak per Sektor	18
Grafik II. 4 Pertumbuhan PNPB Triwulan III Tahun 2024-2025	19
Grafik II. 5 Realisasi dan Komposisi Belanja Negara Triwulan III Tahun 2025	20
Grafik II. 6 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan III Tahun 2024-2025.....	21
Grafik II. 7 Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Tahun 2025	23
Grafik II. 8 Pertumbuhan Transfer ke Daerah Tahun 2024-2025	24
Grafik II. 9 Pendapatan Daerah Triwulan III Tahun 2024-2025.....	28
Grafik II. 10 Komponen Pendapatan Asli Daerah Triwulan III Tahun 2024-2025.....	29
Grafik II. 11 Belanja Daerah Triwulan III Tahun 2024-2025.....	29
Grafik II. 12 Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Pemerintahan Triwulan III Tahun 2025.....	30
Grafik II. 13 Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Triwulan III Tahun 2025.....	32
Grafik III. 1 Indeks Harga Konsumen Makanan dan Minuman Sumatera Barat	36
Grafik III. 2 Laju Output Lapangan Usaha Pertanian dan Perikanan (% yoy)	38

BAB I

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Tari piring khas Minangkabau berasal dari Solok, Sumatera Barat. Menurut legenda awal kemunculannya, Tari Piring berfungsi sebagai tarian dalam upacara kesuburan dan menjadi salah satu bentuk seni tradisional yang banyak sekali menyimpan nilai-nilai estetis yang cukup tinggi dan mengandung nilai-nilai kebudayaan leluhur yang sangat mendalam. - Syahril, "Tari Piring Padang Magek" (2002)

Foto: Erison J Kambari

BAB I

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

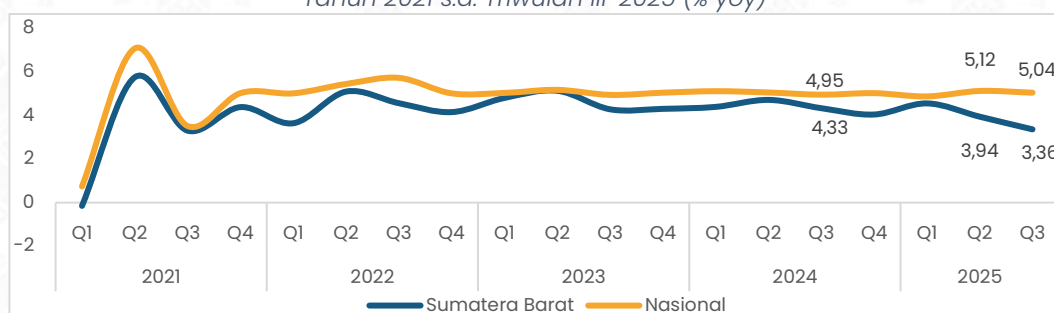
1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Kondisi Perekonomian

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada triwulan III-2025 tetap tumbuh walaupun lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,36 persen (yoy). Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi regional Pulau Sumatera yang sebesar 4,90 persen (yoy), dan juga angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang sebesar 5,04 persen (yoy).

Grafik I. 1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional per Triwulan, Tahun 2021 s.d. Triwulan III-2025 (% yoy)

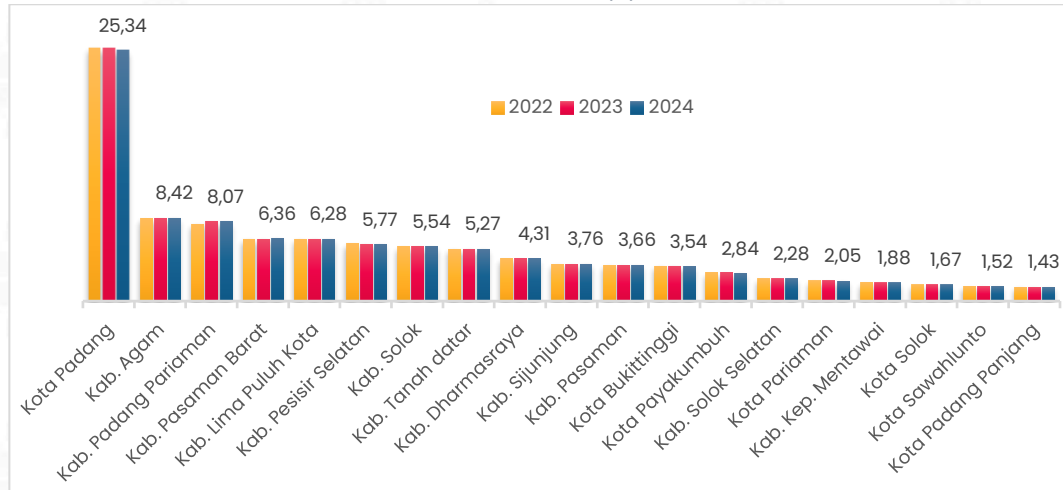


Sumber: BPS, diolah

Sumatera Barat menyumbang sekitar 6,60 persen terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan hanya menyumbang 1,48 persen terhadap perekonomian nasional. Dibanding provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menempati posisi terendah kedua setelah Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 7,48 persen (yoy).

Struktur perekonomian di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sampai 2024 berturut-turut didominasi oleh Kota Padang dengan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 25,34 persen terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat atau senilai Rp84,18 triliun; diikuti oleh Kabupaten Agam sebesar 8,42 persen atau senilai Rp27,98 triliun; Kabupaten Padang Pariaman sebesar 8,07 persen atau senilai Rp26,81 triliun; Kabupaten Pasaman Barat sebesar 6,36 persen atau senilai Rp21,12 triliun; dan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 6,28 persen atau senilai Rp20,85 triliun.

Grafik I. 2 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2024 (%)



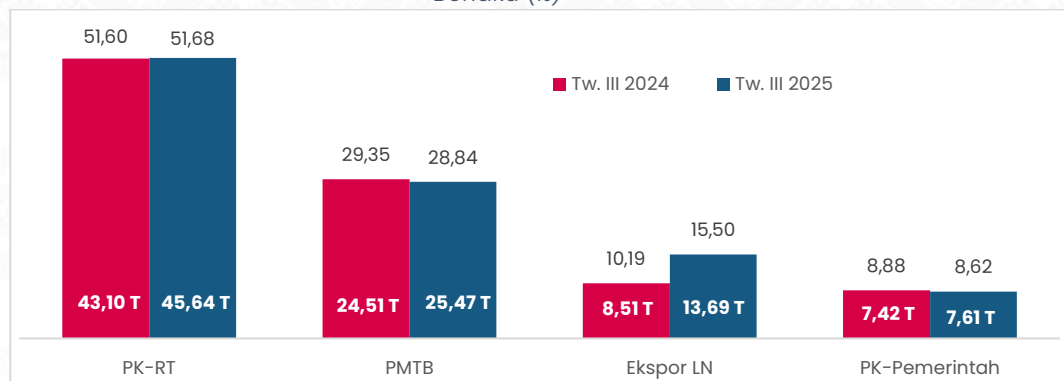
Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

b. Nominal PDRB

1) Berdasarkan PDRB Pengeluaran

Struktur PDRB Nominal Sumatera Barat menurut komponen pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan III-2025 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi triwulan III-2024.

Grafik I. 3 Share Pengeluaran Dengan Kontribusi Besar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Barat yaitu sebesar 51,68 persen atau senilai Rp45,64 triliun, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang berkontribusi sebesar 28,84 persen atau senilai Rp25,47 triliun, komponen Ekspor Luar Negeri dengan kontribusi 15,50 persen atau senilai Rp13,69 triliun; serta komponen Konsumsi Pemerintah yang berkontribusi sebesar 8,62 persen atau senilai Rp7,61 triliun.

Aktivitas masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif hampir di seluruh komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh seluruh komponen pengeluaran dengan

pertumbuhan positif tertinggi dicapai oleh komponen Impor Luar Negeri sebesar 52,18 persen (yoy), komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 38,53 persen (yoy), komponen Konsumsi LNPR sebesar 6,08 persen (yoy), dan komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,64 persen (yoy). Sementara itu, komponen lainnya mengalami penurunan seperti komponen PMTB dengan penurunan sebesar 1,16 persen (yoy) dan komponen Konsumsi Pemerintah yang turun sebesar 0,61 persen (yoy).

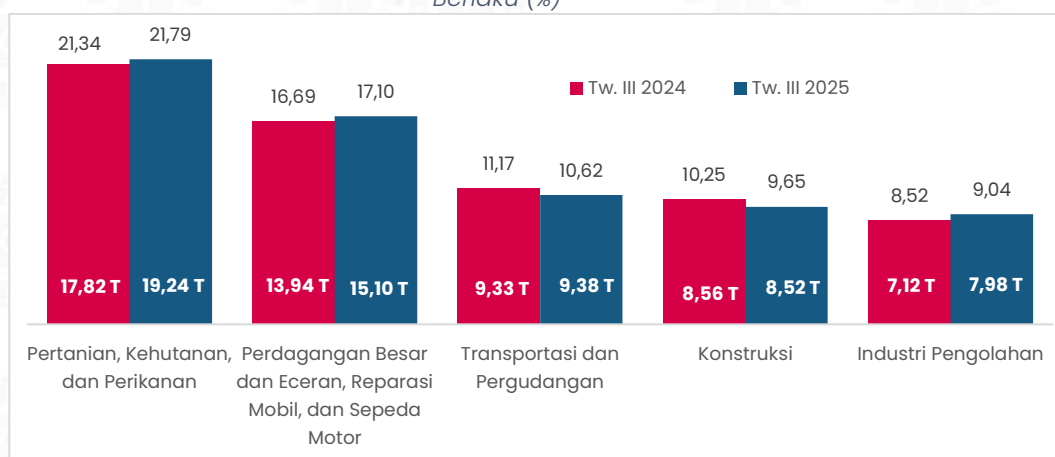
Komponen Ekspor Luar Negeri merupakan sumber pertumbuhan tertinggi pada triwulan III-2025 yakni sebesar 3,50 persen. Ekspor barang luar negeri naik sebesar 37,91 persen, terutama disebabkan oleh komoditas CPO yang mengalami peningkatan volume dibanding triwulan III-2024. Komoditas utama nonmigas juga mengalami kenaikan harga dan volume ekspor. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua yakni komponen konsumsi rumah tangga dengan *share* sebesar 0,80 persen (yoy). Kredit konsumsi naik 4,50 persen (yoy), menandakan dorongan belanja musiman dan kebutuhan dasar tetap berjalan, meski pemulihan daya beli masih belum menyeluruh. Kenaikan tabungan dan deposito menunjukkan sebagian rumah tangga masih memilih berjaga dalam kondisi biaya hidup tinggi. Di sisi lain, indeks konsumsi rumah tangga pertanian meningkat, diikuti oleh perbaikan daya beli petani (NTP), namun belum cukup kuat menjadi penopang konsumsi di daerah agraris. Hal ini mencerminkan ketergantungan pada musim panen dan harga komoditas.

2) Berdasarkan PDRB Per Sektor Lapangan Usaha

Struktur PDRB Nominal Sumatera Barat berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III-2025 secara kontribusi tidak menunjukkan banyak perubahan dibanding kondisi triwulan III-2024. Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,79 persen atau senilai Rp19,24 triliun; diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,10 persen atau senilai Rp15,10 triliun, Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,62 persen atau senilai Rp9,38 triliun, Konstruksi sebesar 9,65 persen atau senilai Rp8,52 triliun, serta Industri Pengolahan sebesar 9,04 persen atau senilai Rp7,98 triliun. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Barat mencapai 68,20 persen.



Grafik I. 4 Share Lapangan Usaha dengan Kontribusi Besar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

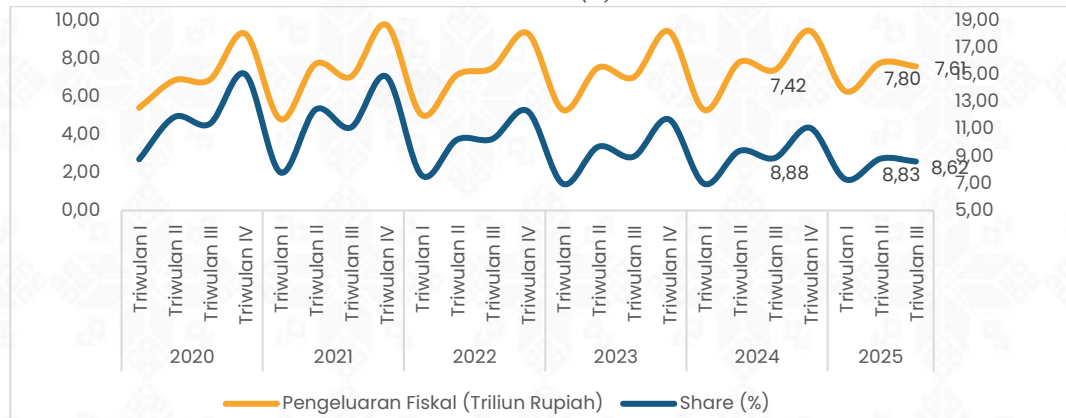
Peningkatan pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan didorong oleh terjadi peningkatan yang signifikan jumlah produksi telur ayam dan daging ayam ras pada triwulan III-2025 dibandingkan triwulan III-2024. Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit, kopi, dan tembakau pada triwulan III-2025 dibandingkan triwulan III-2024. Sedangkan peningkatan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terjadi sebagai dampak peningkatan aktivitas perdagangan besar dan eceran dibanding triwulan III-2024, termasuk perdagangan secara *online*, serta terjadi peningkatan *supply* barang domestik dan barang impor.

1.1.2 Kontribusi Fiskal terhadap Pembentukan PDRB

Pada triwulan III-2025, aktivitas fiskal memberikan kontribusi sebesar 8,62 persen terhadap pembentukan PDRB dengan realisasi atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp4,19 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, laju pertumbuhan fiskal mengalami penurunan sebesar 0,61 persen.

Tren pergerakan kontribusi aktivitas fiskal terhadap PDRB setiap tahun selalu sama, di mana terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada periode triwulan IV, sementara pada triwulan I terjadi tren penurunan. Hal ini terkait dengan pola realisasi belanja pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang masih terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran yaitu periode triwulan IV. Pola realisasi belanja pemerintah, baik dari belanja barang maupun belanja modal selalu menumpuk pada akhir tahun anggaran.

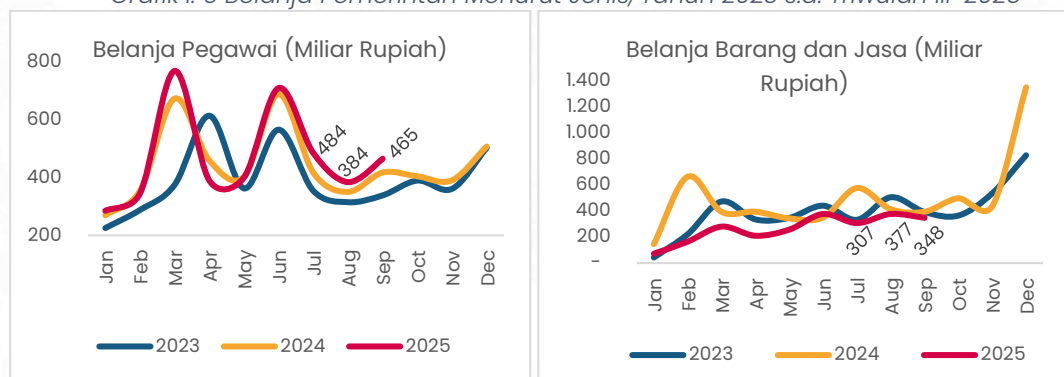
Grafik I. 5 Pengeluaran Fiskal dan Share Terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2020 s.d. Triwulan III-2025 (%)

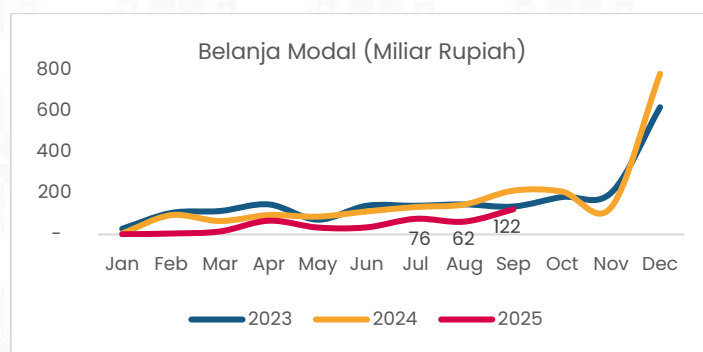


Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Berdasarkan grafik I.5 dapat terlihat bahwa belanja pegawai selalu tinggi pada momen menjelang hari raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru. Peningkatan belanja pegawai pada momen tersebut berkaitan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), bonus insentif, dan Gaji 13. Pola realisasi belanja barang terlihat selalu menumpuk pada akhir tahun yang umumnya disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran yang biasanya terpusat pada beberapa bulan terakhir tahun anggaran, adanya kewajiban untuk menyerap anggaran secara maksimal pada akhir tahun, serta adanya tekanan untuk memenuhi target kinerja anggaran yang turut mempengaruhi realisasi belanja barang pada akhir tahun anggaran. Pola realisasi belanja modal juga mirip dengan pola realisasi belanja barang, yaitu selalu menumpuk pada akhir tahun anggaran yang umumnya disebabkan karena adanya proses pengadaan yang rumit dan perubahan prioritas sehingga membuat banyak pengeluaran modal terjadi pada akhir tahun anggaran. Namun pada triwulan III-2025, realisasi belanja barang dan modal tidak sebanyak realisasi periode yang sama pada dua tahun sebelumnya mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Grafik I. 6 Belanja Pemerintah Menurut Jenis, Tahun 2023 s.d. Triwulan III-2025





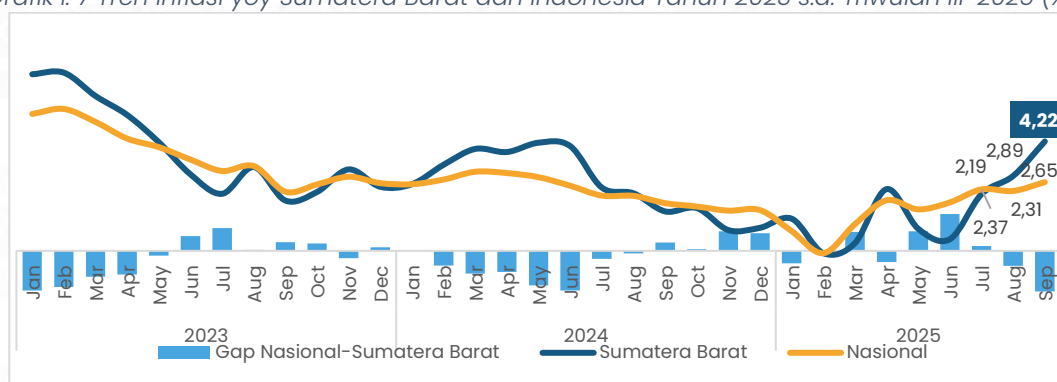
Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

1.1.3 Tingkat Inflasi

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Barat pada empat kabupaten/kota pengukur tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat tercatat bahwa terjadi inflasi yoy pada bulan Juli 2025 sebesar 2,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,10; pada bulan Agustus 2025 sebesar 2,89 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,67; dan pada bulan September 2025 tercatat sebesar 4,22 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,60.

Selama triwulan III tahun 2025, inflasi yoy tertinggi pada tiga bulan berturut-turut terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, di mana inflasi Juli sebesar 2,57 persen, Agustus sebesar 3,96 persen, dan September sebesar 6,38 persen. Sementara itu, yang terendah pada bulan Juli terjadi di Kota Bukittinggi, sedangkan inflasi terendah bulan Agustus dan September terjadi di Kota Padang.

Grafik I. 7 Tren Inflasi yoy Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2023 s.d. Triwulan III-2025 (%)

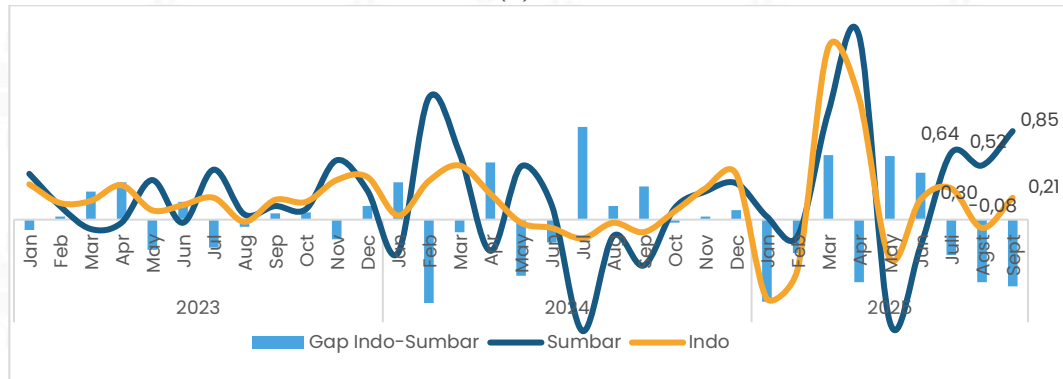


Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Inflasi *year-on-year* di Sumatera Barat selama triwulan III-2025 cenderung lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kecuali pada bulan Juli. Lonjakan inflasi yang terjadi pada triwulan III-2025 disebabkan oleh kenaikan harga dari kelompok *volatile foods*, sebagai dampak dari tingginya permintaan, sementara jumlah pasokan terbatas. Produksi dari sentra-sentra utama di Sumatera Barat mengalami penurunan akibat musim kering yang lebih panjang dari biasanya, sementara pasokan dari daerah lain juga terbatas. Emas

perhiasan turut menjadi penyumbang inflasi akibat dari ketidakpastian ekonomi, krisis, atau ketegangan geopolitik, dan investor cenderung beralih dari aset berisiko ke emas karena dianggap lebih aman, sehingga permintaan emas meningkat.

Grafik I. 8 Tren Inflasi *mtm* Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2023 s.d. Triwulan III- 2025 (%)



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Pada triwulan III-2025, di Provinsi Sumatera Barat terjadi inflasi *mtm* di setiap bulannya. Berdasarkan empat kabupaten/kota pengukur inflasi, pada bulan Juli tercatat inflasi *mtm* sebesar 0,64 persen, bulan Agustus sebesar 0,52 persen, dan bulan September sebesar 0,85 persen.

Inflasi *mtm* di Sumatera Barat yang terjadi pada bulan Juli terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,73 persen) serta kelompok pendidikan (1,26 persen). Meningkatnya harga pada kelompok pendidikan ini berkaitan erat dengan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026. Selanjutnya, pada bulan Agustus kembali terjadi inflasi *mtm*, yang masih disebabkan oleh kelompok yang sama dengan kenaikan pada bulan Juli, yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,56 persen dan kelompok pendidikan dengan kenaikan sebesar 0,16 persen. Sementara itu, inflasi yang terjadi di bulan September terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,15 persen serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,02 persen.

Terkendalinya tekanan inflasi Sumatera Barat sepanjang triwulan III-2025 merupakan hasil sinergi yang kuat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat dalam mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan pasokan. Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah juga dilakukan untuk kelancaran distribusi barang. Selain itu pemerintah setempat juga melakukan komunikasi efektif dengan merupakan kolaborasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi.

1.1.4 Statistik Perbankan Regional

Tabel I. 1 Statistik Perbankan Regional Sumatera Barat (Juta Rupiah)

No	Indikator (Rp Juta)	TW III 2024	TW III 2025	Growth (%)
1	Simpanan	163.027.777	173.648.262	6,51
	- Giro	23.229.944	27.047.028	16,43
	- Tabungan	95.625.535	100.064.170	4,64
	- Simpanan Berjangka	44.172.297	46.537.065	5,35
2	Pinjaman yang diberikan	237.781.232	239.772.658	0,84
	- Modal Kerja	92.086.811	85.358.011	-7,31
	- Investasi	40.192.410	41.808.451	4,02
	- Konsumsi	105.502.009	112.606.197	6,73
3	Kredit UMKM	91.516.760	91.067.911	-0,49
	- Mikro	47.178.097	44.648.987	-5,36
	- Kecil	35.388.772	37.236.344	5,22
	- Menengah	8.949.892	9.182.581	2,60

Sumber: Bank Indonesia

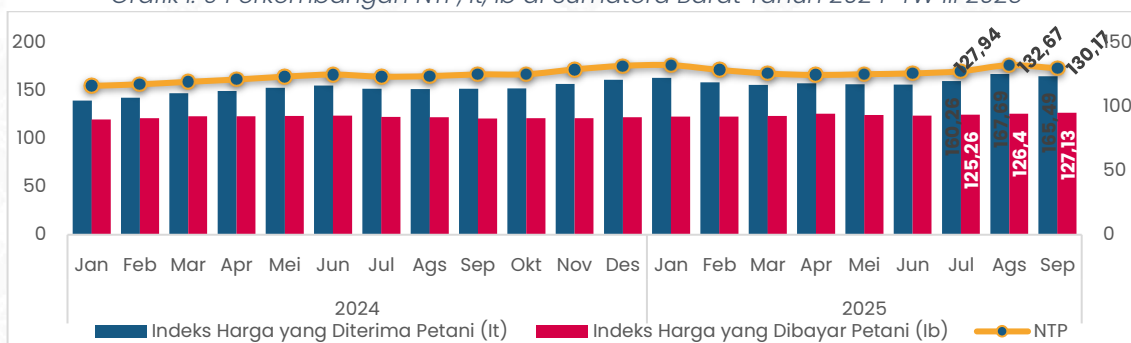
Jumlah Simpanan Keuangan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat selama triwulan III-2025 mencapai Rp173,65 triliun atau tumbuh sebesar 6,51 persen (yoy). Sedangkan total Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat di Sumatera Barat sepanjang triwulan III-2025 mencapai Rp239,77 triliun atau tumbuh sebesar 0,84 persen (yoy). Sementara itu, jumlah Kredit UMKM di Sumatera Barat sepanjang triwulan III-2025 mencapai Rp91,07 triliun atau turun sebesar 0,49 persen (yoy).

1.2 Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan dan Pembangunan

1.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP diukur dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Semakin tinggi NTP, maka secara relatif semakin kuat pula kemampuan/daya beli petani.

Grafik I. 9 Perkembangan NTP, It, Ib di Sumatera Barat Tahun 2024–TW III 2025



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

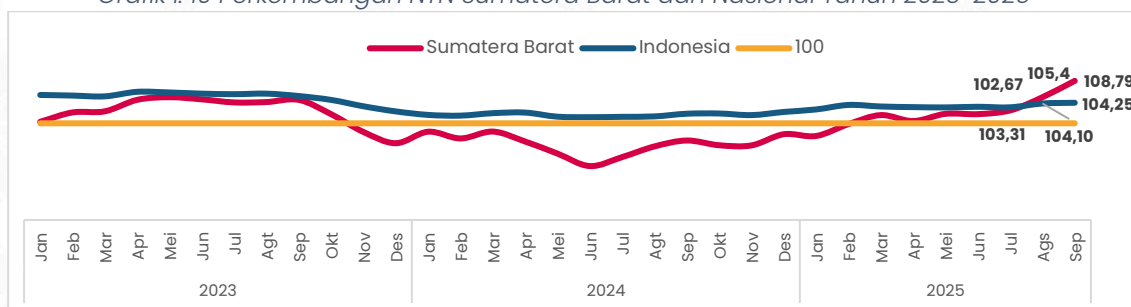
NTP Sumatera Barat sepanjang triwulan III-2025 nilainya berada di atas 100 yang menggambarkan bahwa konsumsi petani mampu dipenuhi oleh pendapatannya. NTP yang di atas 100 juga mencerminkan harga jual produk pertanian yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang-barang yang dikonsumsi petani. Pada Juli 2025, NTP Sumatera Barat tercatat sebesar 127,94 atau meningkat sebesar 1,34 persen dibandingkan dengan NTP Juni 2025 yang tercatat sebesar 126,25. Kemudian pada Agustus 2025 terjadi peningkatan kembali sebesar 3,70 persen, menjadi 132,67. Selanjutnya, pada September 2025, NTP Sumatera Barat sebesar 130,17, atau turun 1,88 persen dibanding bulan sebelumnya.

Lebih lanjut, jika dilihat per subsektor, peningkatan NTP pada triwulan III-2025 terjadi karena meningkatnya NTP pada beberapa subsektor. Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Perikanan selalu mengalami peningkatan NTP setiap bulannya pada triwulan III-2025. Sementara itu, NTP Subsektor Hortikultura dan Perikanan mengalami fluktuasi angka NTP pada periode tersebut.

1.2.2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Secara konseptual, NTN mengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. NTN diukur dengan membandingkan indeks harga yang diterima nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Semakin tinggi NTN, maka secara relatif semakin kuat pula kemampuan/daya beli nelayan.

Grafik I. 10 Perkembangan NTN Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023–2025



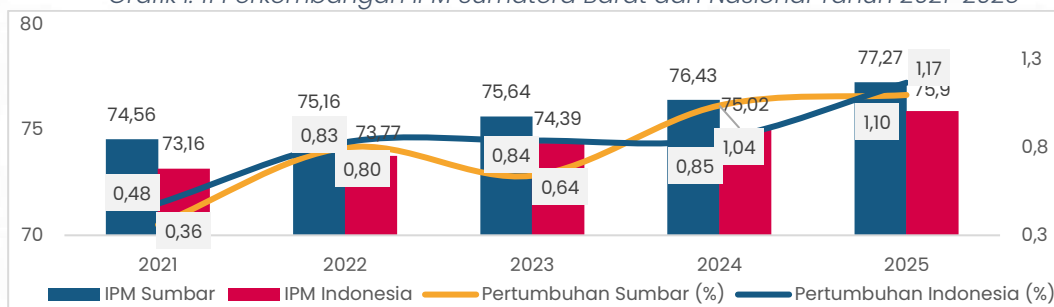
Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

NTN Sumatera Barat sepanjang triwulan III-2025 tercatat di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli nelayan di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan III-2025 sudah optimal. NTN pada bulan Juli sebesar 102,67, meningkat 2,66 persen pada bulan Agustus menjadi 105,40, dan terjadi peningkatan kembali pada bulan September sebesar 3,22 menjadi 108,79. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan capaian nasional, NTN Sumatera Barat relatif lebih tinggi, kecuali pada bulan Juli, di mana NTN Indonesia sebesar 103,31.

1.2.3 Indikator Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi ukuran kualitas hidup karena mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. IPM Provinsi Sumatera Barat kembali membaik pada tahun 2025 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita.

Grafik I. 11 Perkembangan IPM Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021–2025



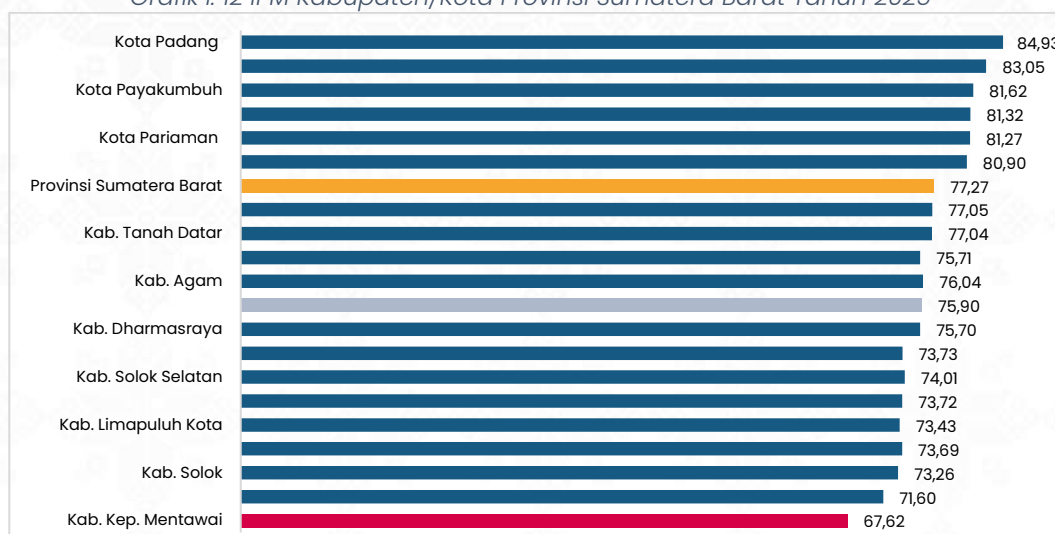
Sumber: BPS, diolah

Pada tahun 2025, IPM Provinsi Sumatera Barat mencapai 77,27 persen, meningkat 1,10 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 76,43. Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat

yang diukur berdasarkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) mencapai 74,69 tahun, atau meningkat 0,32 tahun (0,43 persen) dibandingkan tahun 2024. Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun mencapai 14,31 tahun pada tahun 2025, atau setara dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Perguruan Tinggi tingkat II, dan angka ini meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,77 tahun, atau setara dengan waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat SMP atau sederajat, dan angka ini meningkat 0,33 tahun (3,50 persen) dibandingkan tahun 2024. Di sisi lain, dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) masyarakat Indonesia mencapai Rp12,04 juta per tahun, atau meningkat 2,76 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp11,72 juta per tahun.

Apabila dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Sumatera Barat berada di atas IPM Nasional yang tercatat sebesar 75,90 pada tahun 2025. Pada tahun 2025 terdapat 6 kota di Sumatera Barat pada level IPM sangat tinggi, 12 kabupaten/kota dengan status tinggi, dan 1 kabupaten dengan status IPM sedang, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Grafik 1. 12 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

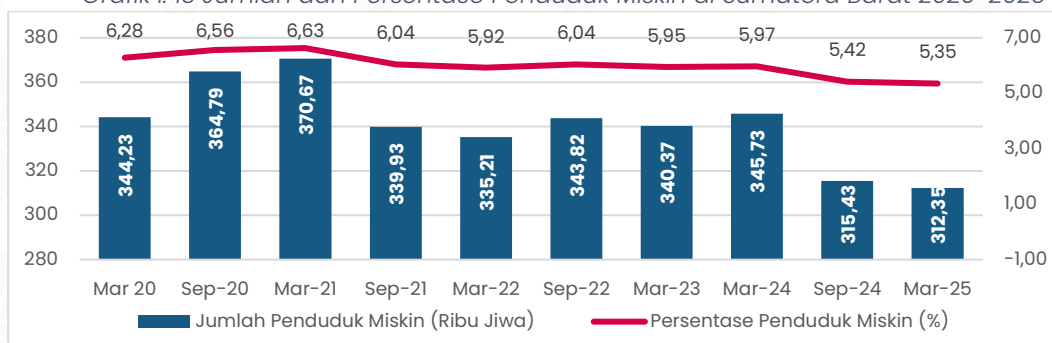


Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

1.2.4 Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat cenderung berfluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat mengalami penurunan dari 5,42 persen atau sebanyak 315,43 ribu jiwa (September 2024) menjadi 5,35 persen atau sebanyak 312,35 ribu jiwa (Maret 2025).

Grafik I. 13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat 2020–2025



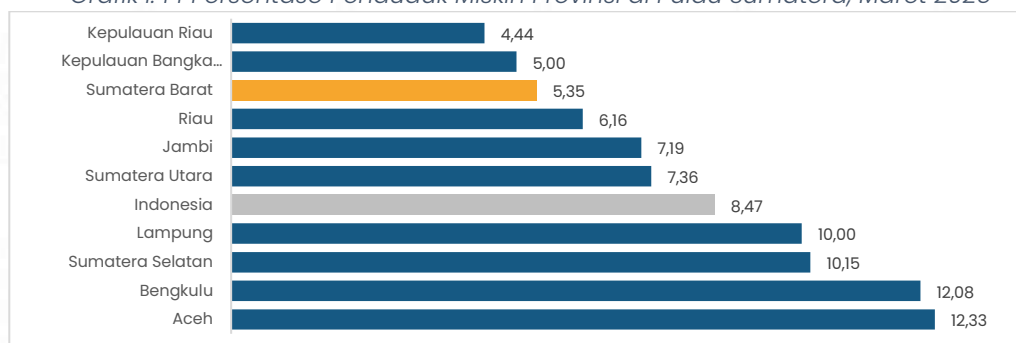
Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada Maret 2025 tercatat mencapai 312,35 ribu jiwa, berkurang sekitar 3.080 orang dibandingkan September 2024 yang tercatat sebanyak 315,43 ribu jiwa. Sementara berdasarkan tempat tinggal pada periode Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 6.240 jiwa dan di perdesaan turun sebesar 3.150 jiwa jika dibandingkan dengan periode September 2024.

Untuk menekan angka kemiskinan di Sumatera Barat khususnya di daerah perdesaan, Pemerintah Provinsi telah melakukan berbagai program dan kegiatan baik di bidang pertanian secara luas, perdagangan (UMKM) maupun pariwisata dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Alokasi APBD untuk sektor unggulan juga telah diperbesar sehingga efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Persentase penduduk miskin Sumatera Barat masih relatif lebih kecil dari kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 8,47 persen pada Maret 2025. Sementara jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di regional Sumatera, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat berada di posisi ke-3 terendah, di mana Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi (12,33 persen) dan Provinsi Kepulauan Riau yang terendah (4,44 persen). Kemiskinan di seluruh Provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan sebesar 0,20 persen pada periode Maret 2025 jika dibandingkan dengan periode September 2024.

Grafik I. 14 Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Sumatera, Maret 2025



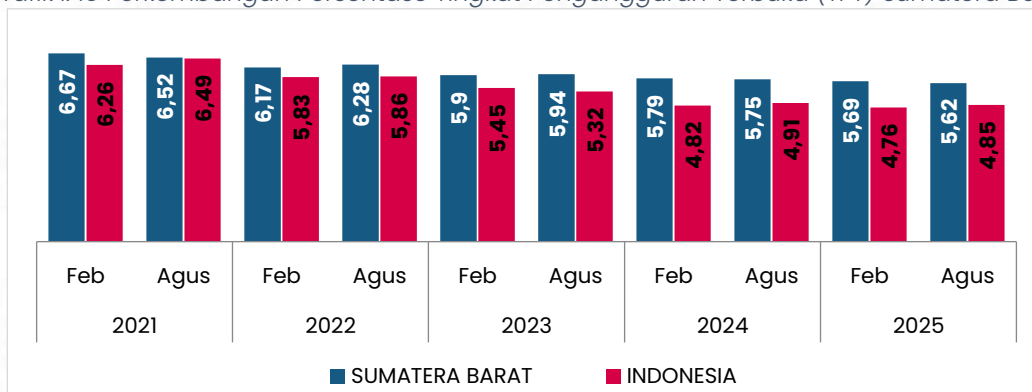
Sumber: BPS, diolah

1.2.5 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Membaiknya kondisi perekonomian mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 93,83 ribu pada Agustus 2025 dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Agustus 2025, penduduk usia kerja di Sumatera Barat terdapat sebanyak 4,48 juta orang, bertambah sebesar 67,96 ribu orang yang terdiri atas angkatan kerja sebanyak 3,20 juta orang (bertambah sebesar 95,19 ribu orang) dan bukan angkatan kerja sebanyak 1,28 juta orang (berkurang 27,22 ribu orang). Komposisi angkatan kerja Sumatera Barat terdiri atas 3,02 juta orang bekerja (bertambah 93,83 ribu orang) dan 179,63 ribu orang pengangguran (bertambah 1,35 ribu orang). Jika dirinci, dari 3,02 juta orang yang bekerja, terdapat sebanyak 1,91 juta orang pekerja penuh (berkurang 33,93 ribu orang), sebanyak 789,78 ribu orang pekerja paruh waktu (bertambah 62,17 ribu orang), dan sebanyak 332,79 ribu orang setengah pengangguran (turun 2,27 ribu orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Sumatera Barat hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 5,62 persen, yang berarti dari 100 orang Angkatan kerja, terdapat sekitar 5 sampai 6 orang penganggur. Angka ini turun sebesar 0,13 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024. TPT Perkotaan tercatat sebesar 6,53 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT Perdesaan yang tercatat sebesar 4,51 persen. TPT Perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin dan TPT Perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin dibanding Agustus 2024.

Grafik I. 15 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat



Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah

BAB II

ANALISIS FISKAL REGIONAL

Gerakan tari piring pada umumnya adalah meletakkan dua piring di atas telapak tangan dan diayunkan dengan cepat, diselingi dengan mendinginkan piring. Pada akhir tarian, biasanya piring-piring yang dibawakan oleh para penari dilemparkan ke lantai dan para penari akan menari di atas pecahan-pecahan piring. Jumlah penari tari piring biasanya berjumlah ganjil yang terdiri dari tiga sampai tujuh orang.

Foto: Erison J Kambari

BAB II

ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1. Pelaksanaan APBN

Pada Triwulan III-2025, pelaksanaan APBN menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Melalui Inpres tersebut, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan evaluasi serta penghematan belanja dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan dana negara. Efisiensi APBN antara lain diwujudkan dalam bentuk pengetatan belanja perjalanan dinas, pemblokiran anggaran yang belum jelas peruntukannya, serta pengendalian Transfer ke Daerah (TKD) untuk belanja tertentu. Sementara itu, pada level APBD efisiensi dilakukan melalui pengalihan anggaran menuju belanja yang lebih produktif dan bermanfaat.

Tabel II. 1 I-Account APBN Wilayah Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2024-2025
(dalam miliar Rp)

Uraian	TA 2024			TA 2025			Growth
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
PENDAPATAN NEGARA	8.503,40	5.181,86	60,94%	7.688,28	5.986,17	77,86%	15,52%
Pendapatan Perpajakan	6.972,23	3.795,39	54,44%	6.064,56	4.446,97	73,33%	17,17%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.531,17	1.386,47	90,55%	1.623,72	1.539,20	94,80%	11,02%
BELANJA NEGARA	35.123,48	24.648,77	70,18%	32.179,93	22.553,65	70,09%	-8,50%
Belanja Pemerintah Pusat	14.041,51	8.683,10	61,84%	11.956,46	7.069,17	59,12%	-18,59%
Belanja Pegawai	5.281,34	4.029,73	76,30%	5.751,55	4.229,46	73,54%	4,96%
Belanja Barang	6.289,78	3.675,13	58,43%	4.644,64	2.393,81	51,54%	-34,86%
Belanja Modal	2.427,69	949,40	39,11%	1.513,14	416,48	27,52%	-56,13%
Bantuan Sosial	42,71	28,83	67,35%	47,12	29,40	62,40%	1,97%
Transfer ke Daerah	21.081,98	15.965,66	75,73%	20.223,47	15.484,48	76,57%	-3,01%
Dana Bagi Hasil	630,76	345,24	54,73%	661,73	425,30	64,27%	23,19%
Dana alokasi Umum	14.207,71	11.341,29	79,82%	13.719,94	11.102,13	80,92%	-2,11%
Dana alokasi Khusus Fisik	1.126,55	536,24	47,60%	475,89	198,62	41,74%	-62,96%
Dana alokasi Khusus Nonfisik	3.832,79	2.667,99	69,61%	4.167,51	2.751,47	66,02%	3,13%
Dana Desa	1.050,68	936,07	89,09%	1.054,40	893,13	84,71%	-4,59%
Dana Insentif Fiskal	233,48	138,80	59,45%	143,99	113,81	79,04%	-18,01%
SURPLUS/(DEFISIT)	(26.620,09)	(19.446,91)	73,13%	(24.491,65)	(16.567,48)	67,65%	-14,89%
PEMBIAYAAN	1.722,39	909,36	52,80%	1.194,09	727,57	60,93%	-19,99%
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SikPA)							

Sumber: OMSPAN, DJP, DJBC, diolah

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 30 September 2025 tercatat sebesar Rp5,98 triliun atau 77,86 persen dari target APBN 2025. Di sisi lain, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp22,55 triliun atau 70,09 persen dari alokasi pagu 2025. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp7,06 triliun dan TKD sebesar Rp15,48 triliun. Dengan kondisi tersebut, posisi

APBN Regional Sumatera Barat hingga akhir September 2025 mengalami defisit sebesar Rp16,56 triliun, atau lebih rendah 14,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 September 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 15.52 persen (yoy), meningkat dari Rp5,18 triliun pada 2024 menjadi Rp5,98 triliun pada 2025. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pendapatan perpajakan yang naik signifikan sebesar 17.17 persen seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik dan kinerja ekspor. Sementara itu, PNBPN juga tumbuh positif meski lebih moderat, yakni 11.02persen.

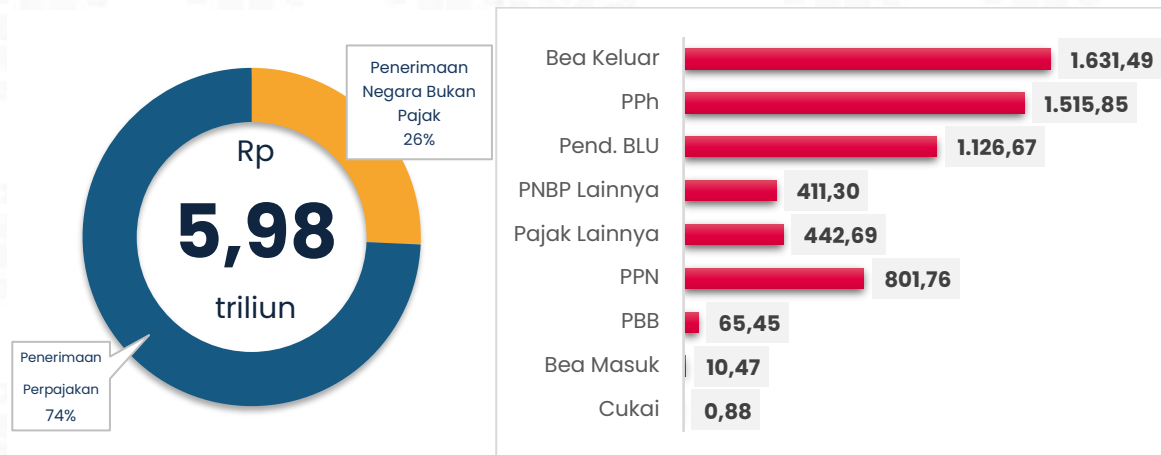
Di sisi lain, realisasi Belanja Negara mengalami kontraksi sebesar 8.50 persen (yoy), turun dari Rp24,64 triliun pada 2024 menjadi Rp22,55 triliun pada 2025. Penurunan ini terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pemblokiran belanja tertentu serta pergeseran alokasi pada belanja yang lebih prioritas. Selain itu, sebagian satuan kerja juga menunda pelaksanaan kegiatan sambil menunggu arahan lebih lanjut terkait langkah-langkah penghematan yang ditetapkan pemerintah.

2.1.1 Pendapatan Negara

Pendapatan Negara di Sumatera Barat didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang berkontribusi hingga 74,29 persen, sementara sisanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 25,71 persen. Secara lebih rinci, Pajak Perdagangan Internasional menjadi penyumbang terbesar yang sebagian besar berasal dari Bea Keluar yaitu menyumbang Rp1,65 triliun atau 27,54 persen. Di posisi berikutnya, Pajak Penghasilan (PPh) dengan realisasi Rp1,58 triliun atau 26,42 persen dari total pendapatan. Selanjutnya, Pendapatan BLU memberikan kontribusi sebesar 18,84 persen sebesar Rp1,13 triliun, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp861,91 miliar atau 14,40 persen. Sementara itu, PNBP Lainnya menyumbang Rp411,53 miliar atau 6,87 persen. Kemudian, Pajak Lainnya menyumbang Rp277,73 miliar atau 4,64 persen, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat Rp65,45 miliar atau 1,09 persen, dan Cukai menyumbang Rp878,21 juta atau berkontribusi di bawah 1 persen terhadap total pendapatan.



Grafik II. 1 Realisasi dan Komposisi Pendapatan Negara Triwulan III Tahun 2025
(dalam miliar Rp)

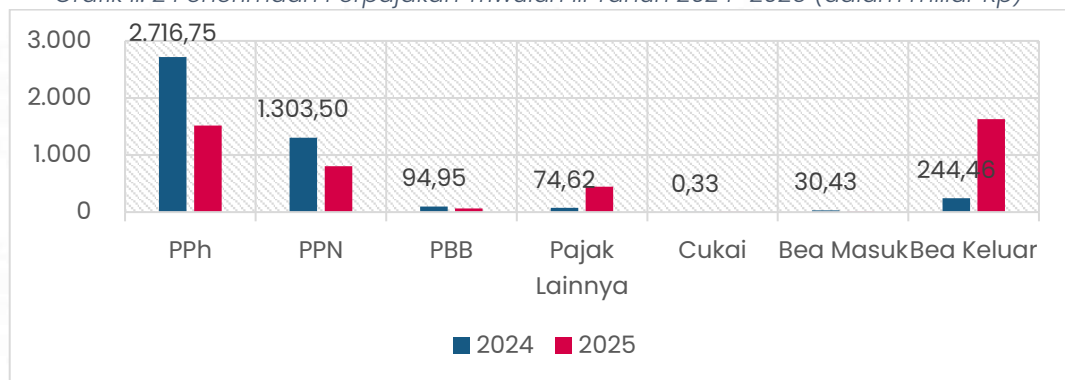


a. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan di wilayah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 30 September 2025 tercatat sebesar Rp4,45 triliun miliar atau 73,33 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp6,06 triliun. Kinerja penerimaan ini menunjukkan tren positif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,17 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp3,80 triliun.

Secara komposisi, Penerimaan Perpajakan terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri hingga akhir Triwulan III-2025 terealisasi sebesar Rp2,79 triliun atau 49,31 persen dari target sebesar Rp5,65 triliun. Realisasi ini mengalami kontraksi (penurunan) sebesar 20,82 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp3,52 triliun.

Grafik II. 2 Penerimaan Perpajakan Triwulan III Tahun 2024–2025 (dalam miliar Rp)



Sumber: DJP, DJBC, diolah

1) Pajak Dalam Negeri

Realisasi Pajak Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Barat hingga 30 September 2025 tercatat sebesar Rp2,79 triliun, atau 49,31 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp5,65 triliun. Kinerja ini menurun dibandingkan periode yang sama

tahun 2024 yang mencapai Rp3,52 triliun, sehingga terjadi kontraksi 20,82 persen (yoy). Penurunan terutama dipicu oleh koreksi pada pos-pos pajak utama, yakni PPh yang turun 27,09 persen (yoy) dan PPN yang merosot 32,76 persen (yoy). Kondisi ini mencerminkan lemahnya kontribusi aktivitas ekonomi domestik terhadap penerimaan negara pada periode ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan komponen penyusunnya, PPh masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp1,58 triliun miliar atau 51,37 persen dari target Rp3,08 triliun. Namun demikian, capaian ini lebih rendah dibandingkan 2024 sebesar Rp2,17 triliun, sehingga mengalami kontraksi 27,09 persen (yoy). Komponen terbesar kedua adalah PPN yang terealisasi Rp861,91 miliar atau 34,47 persen dari target Rp2,50 triliun, turun tajam 32,76 persen (yoy) dibandingkan realisasi 2024 sebesar Rp1,28 triliun. Berbeda dengan dua komponen sebelumnya, PBB justru menunjukkan tren penguatan dengan realisasi Rp65,45 miliar atau 102,06 persen dari target Rp64,13 miliar, tumbuh 11,55 persen (yoy) dari capaian Rp58,67 miliar tahun sebelumnya.

Meski komponen utama mengalami kontraksi, beberapa jenis pajak lainnya membukukan kinerja positif. Cukai terealisasi Rp878,21 juta, melampaui target Rp252,18 juta dengan capaian 348,25 persen sekaligus tumbuh 163,88 persen (yoy) dari realisasi 2024 sebesar Rp 332,80 juta. Selain itu, Pajak Lainnya melonjak signifikan dengan realisasi Rp277,73 miliar, atau 2.931,21 persen dari target Rp9,47 miliar, meningkat tajam 2.536,64 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp10,53 miliar.

Penurunan secara umum pada pajak dalam negeri ini disebabkan oleh kebijakan pemusatan tempat terutang PPN (sentralisasi) di mana pendapatan pajak dari orang/badan yang masuk WP Pusat kini tercatat sebagai penerimaan pusat. Hal lain yang menjadi catatan adalah adanya restitusi pajak yang cukup besar sehingga menjadikan pertumbuhan pajak neto menjadi negatif. Sementara itu, lonjakan drastis pada Pajak Lainnya disebabkan oleh akun deposit yang belum dilakukan pelaporan pajak (SPT Masa), sehingga dana tersebut masuk dalam akun pajak lainnya dan terlihat meningkat signifikan.

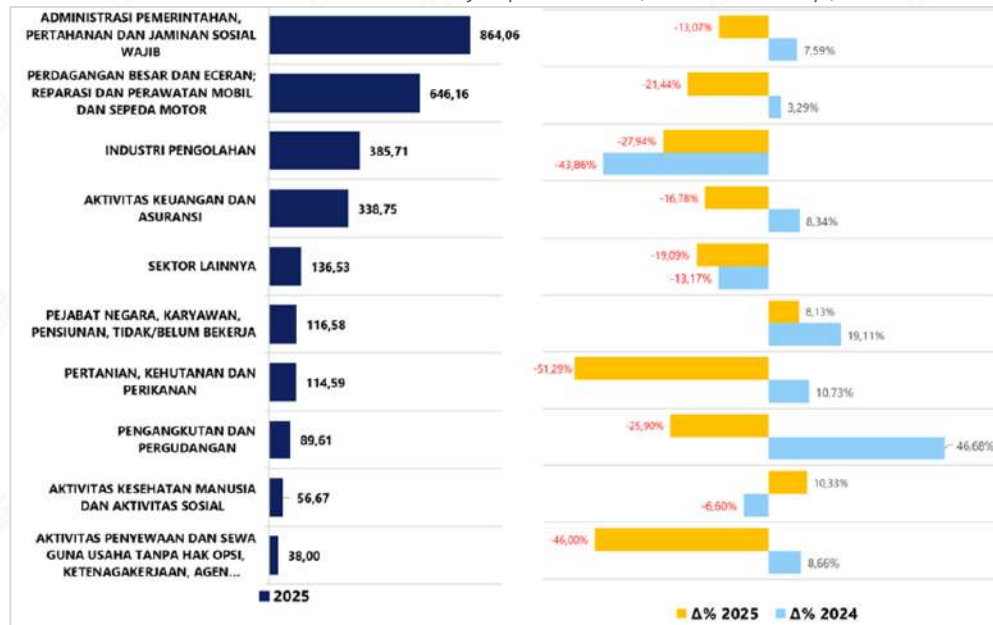
Dengan demikian, kontraksi Pajak Dalam Negeri hingga Triwulan III-2025 terutama bersumber dari melemahnya penerimaan PPh dan PPN. Namun, peningkatan luar biasa pada Pajak Lainnya serta capaian positif Cukai dan PBB menjadi penopang yang menahan penurunan lebih dalam pada total kinerja Pajak Dalam Negeri.

Berdasarkan penerimaan pajak per sektor, Sektor Administrasi Pemerintahan menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Sumatera Barat dengan total penerimaan sebesar Rp864,06 miliar, sektor ini tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Sektor Perdagangan Besar



dan Eceran tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Sektor Industri Pengolahan tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama.

Grafik II. 3 Penerimaan Pajak per Sektor (dalam Miliar Rp)



Sumber: Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, diolah

2) Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pajak Perdagangan Internasional di Provinsi Sumatera Barat hingga 30 September 2025 tercatat sebesar Rp1,66 triliun, atau 403,22 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp411,55 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, penerimaan ini meningkat sangat signifikan sebesar 503,66 persen (yoy) dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp274,90 miliar. Peningkatan yang sangat besar ini terutama bersumber dari Bea Keluar/Pungutan Ekspor yang terealisasi sebesar Rp1,65 miliar atau 426,40 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp386,69 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp244,46 miliar, Bea Keluar mengalami pertumbuhan sebesar 574,48 persen (yoy). Nilai capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan Bea Keluar pada Triwulan III-2025 jauh melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Bea Masuk pada periode yang sama mencatat realisasi sebesar Rp10,58 miliar, atau 42,56 persen dari target Rp24,86 miliar.

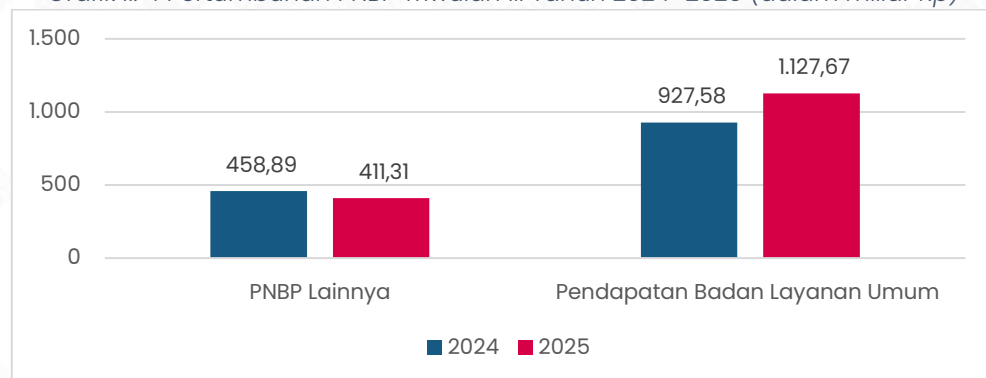
Dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp274,90 miliar, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada Triwulan III-2025 melonjak signifikan menjadi Rp1,66 triliun atau tumbuh sangat tinggi sebesar 503,66 persen (yoy). Kenaikan tajam ini terutama ditopang oleh Bea Keluar, yang secara nominal memberikan kontribusi jauh lebih besar dibandingkan Bea Masuk. Secara keseluruhan, realisasi

Pajak Perdagangan Internasional hingga akhir September 2025 telah mencapai 403,22 persen dari target tahunan sebesar Rp411,55 miliar, sehingga mampu melampaui target lebih dari empat kali lipat. Capaian ini menjadikan Pajak Perdagangan Internasional sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan penerimaan negara di Sumatera Barat pada tahun berjalan 2025. Produk yang mengalami peningkatan tertinggi adalah RBD *Palm Stearin (Soft)* sebesar 5.045,62 persen, RBD *Palm Oil* sebesar 2.553,76 persen dan *Palm Fatty Acid Distillate* yang mengalami pertumbuhan 2.091,40 persen.

Penerimaan pajak internasional di KPPBC TMP B Teluk Bayur meningkat signifikan di Triwulan I-2025 khususnya di bulan Februari 2025 dan selanjutnya mulai menurun sampai dengan bulan September 2025. Penurunan penerimaan ini sejalan dengan menurunnya harga-harga komoditas khususnya produk sawit di pasar internasional, meskipun secara umum lebih tinggi dibanding dengan tahun 2024 dan 2023. Penurunan harga komoditas ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi di negara tetangga khususnya Malaysia, proyeksi penurunan permintaan dari India sebagai konsumen utama dan peningkatan nilai dolar Amerika Serikat.

b. Pendapatan PNB

Grafik II. 4 Pertumbuhan PNB Triwulan III Tahun 2024–2025 (dalam miliar Rp)



Sumber: OMSPAN, diolah

Realisasi PNB di Provinsi Sumatera Barat hingga 30 September 2025 tercatat sebesar Rp1,54 triliun atau 94,80 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,62 triliun. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 11,02 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang terealisasi Rp1,39 triliun. Kinerja positif ini mengindikasikan bahwa kontribusi PNB terhadap pendapatan negara di daerah terus mengalami penguatan dari tahun ke tahun.

Dari sisi struktur penerimaan, Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kontributor terbesar, menyumbang 73,26 persen dari total PNB dengan realisasi mencapai Rp1,13 triliun hingga akhir September 2025, meningkat sebesar 21,57 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun

sebelumnya sebesar Rp927,58 miliar. Peningkatan ini didorong oleh dua sumber utama, yakni:

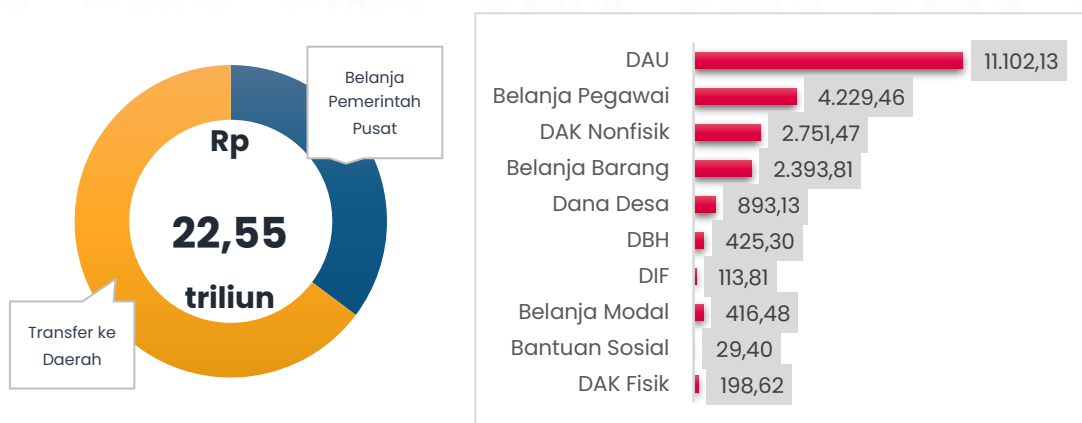
- 1) Jasa pelayanan rumah sakit, yang mengalami pertumbuhan 12,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menyumbang nilai penerimaan sebesar Rp786,55 miliar pada Triwulan III-2025.
- 2) Pendapatan tertinggi diterima oleh satker BLU pada Kementerian Kesehatan, dan diikuti oleh pendapatan BLU dari Kementerian Agama. Pada Kementerian Agama di Sumatera Barat terdapat satker UIN yang bergerak di bidang Pendidikan.

Selain BLU, kelompok penerimaan PNPB lainnya mencakup pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam, jasa giro, denda, dan penerimaan lain-lain. Meskipun kontribusinya tidak sebesar BLU, kelompok penerimaan ini tetap berperan dalam menopang kinerja keseluruhan PNPB di Sumatera Barat pada Triwulan III-2025. Dengan persentase capaian 63,40 persen dari target tahunan hanya dalam enam bulan pertama, tren PNPB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 memberikan indikasi positif terhadap peluang pencapaian, bahkan potensi melampaui target tahunan jika tren pertumbuhan, terutama pada sektor BLU, dapat terus dipertahankan pada Triwulan III sekaligus memperkuat peran PNPB sebagai salah satu tulang punggung pembiayaan layanan publik di luar penerimaan perpajakan.

2.1.2 Belanja Negara

Belanja Negara di Provinsi Sumatera Barat hingga 30 September 2025 terealisasi sebesar Rp22,55 triliun atau 70,09 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp32,18 triliun. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 8,50 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp24,65 triliun.

Grafik II. 5 Realisasi dan Komposisi Belanja Negara Triwulan III Tahun 2025



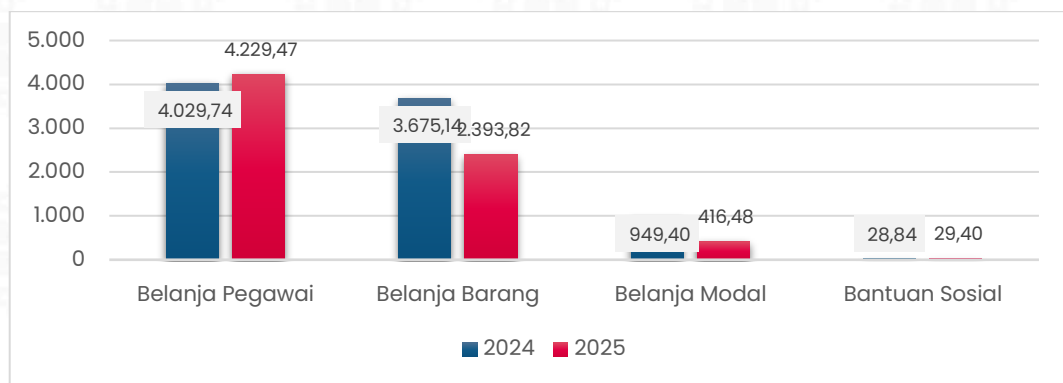
Sumber: OMSPAN dan SIKD, diolah

Belanja Negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD), dengan komposisi masing-masing sebesar 31,34 persen dan 68,66 persen dari total realisasi Belanja Negara. Belanja Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Sumatera Barat, sedangkan TKD disalurkan kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat.

a. Belanja Pemerintah Pusat

Hingga tanggal 30 September 2025, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp7,07 triliun atau 59,12 persen pagu. Jumlah ini mengalami penurunan 18,59 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang disebabkan oleh implementasi kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Grafik II. 6 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan III Tahun 2024-2025 (dalam miliar Rp)



Sumber: OMSPAN, diolah

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp4,23 triliun atau 73,54 persen dari pagu dan mengalami kenaikan 4,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pergerakan realisasi ini dipengaruhi oleh perubahan komponen belanja, antara lain Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK, Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara, Gaji dan Tunjangan TNI/Polri, Belanja Honorarium, serta Tunjangan Khusus & Pegawai Transito. Sementara itu, Belanja Barang terealisasi sebesar Rp2,39 triliun atau 51,54 persen dari pagu, turun sebesar 34,86 persen dibandingkan realisasi hingga akhir September 2024. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya seluruh komponen belanja barang, yaitu penurunan Belanja Barang Non Operasional, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Jasa, dan Belanja Operasional masing-masing sebesar 77,91 persen (yoy), 62,85 persen (yoy), 42,70 persen (yoy), dan 16,6 persen (yoy).

Belanja Modal mengalami kontraksi tajam, dengan realisasi sebesar Rp416,48 miliar atau 27,52 persen dari pagu, turun 56,13 persen dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini terjadi pada seluruh komponen Belanja Modal, yaitu

Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Peralatan; Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; serta Belanja Modal BLU masing-masing sebesar 66,76 persen (yoy), 40,16 persen (yoy), 55,08 persen (yoy), dan 58,76 persen (yoy).

Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp29,40 miliar atau 62,40 persen dari pagu dan mengalami kenaikan 1,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Belanja ini terutama berasal dari Kementerian Agama, yang mencakup Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah bagi siswa SD-TK penerima Program Indonesia Pintar, serta Bantuan Beasiswa KIP Kuliah *On Going* untuk mahasiswa PTKI penerima KIP Kuliah.

1) Belanja Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

Belanja K/L selain ditujukan untuk mendukung keberlanjutan dan akselerasi transformasi ekonomi, juga dimanfaatkan untuk mendukung: (1) pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13; (2) pendanaan proyek tahun jamak (*multiyears*); (3) modernisasi Alutsista; dan (4) kelanjutan reformasi birokrasi dan reformasi penganggaran dengan melanjutkan dan mempertajam kebijakan konsolidasi dan pendisiplinan fiskal. Adapun 10 Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki pagu terbesar dilingkup wilayah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data pada aplikasi Sintesa per tanggal 30 Juli 2025 sebagai berikut:

Tabel II. 2 Sepuluh Bagian Anggaran dengan Pagu Belanja Tertinggi (dalam miliar Rupiah)

No	Nama Bagian Anggaran	2024	2025
1	Kementerian Agama	2.452,00	2.240,21
2	Kementerian Pekerjaan Umum	-	1.743,59
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.454,16	1.434,74
4	Kementerian Kesehatan	1.257,10	1.360,94
5	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	-	1.068,51
6	Kementerian Pertahanan	713,44	700,33
7	Kementerian Perhubungan	842,98	474,93
8	Kejaksaan Republik Indonesia	259,94	288,70
9	Kementerian Pertanian	176,61	286,79
10	Mahkamah Agung	210,10	268,97

Sumber: Sintesa, diolah

Anggaran belanja terbesar dialokasikan untuk sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan keamanan. Satuan kerja lingkup Kementerian Agama di Sumatera Barat memperoleh anggaran terbesar senilai Rp2,24 triliun yang berfokus

pada peningkatan mutu pendidikan madrasah, layanan keagamaan, dan penyelenggaraan ibadah haji. Pagu belanja terbesar kedua dikelola oleh Satuan kerja lingkup Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,74 triliun yang memprioritaskan percepatan proyek strategis, pembangunan konektivitas jalan nasional, dan penyediaan prasarana dasar seperti sanitasi dan air minum, diikuti oleh satuan kerja lingkup Kepolisian Republik Indonesia dengan total pagu sebesar Rp1,43 triliun yang berfokus pada menjaga stabilitas Kamtibmas, mengoptimalkan pelayanan publik, dan penegakan hukum yang transparan.

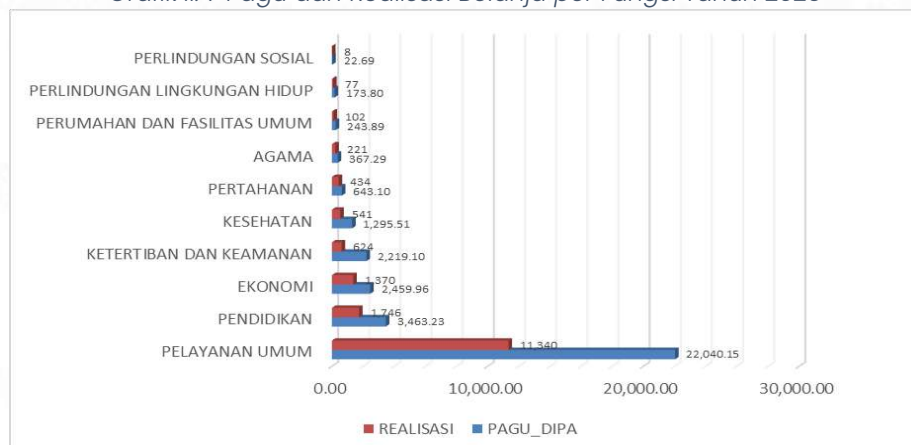
Belanja yang digunakan untuk sektor kesehatan dan pendidikan tinggi juga mendapat alokasi besar yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dengan pagu Rp1,36 triliun mengutamakan akses universal melalui JKN dan pencegahan penyakit, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang memperoleh porsi pagu Rp1,07 triliun untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta mendorong penelitian dan inovasi.

Anggaran belanja dengan nilai cukup besar juga dialokasikan untuk satuan kerja lingkup Kementerian Pertahanan senilai Rp700,32 miliar untuk modernisasi Alutsista dan profesionalisme prajurit, satuan kerja lingkup Kementerian Perhubungan sebesar Rp474,92 miliar untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis termasuk dukungan IKN. Sementara itu, Pagu DIPA dengan total di bawah Rp300 miliar dikelola oleh Kejaksaan RI (Rp288,70 miliar) dan Mahkamah Agung (Rp268,96 miliar) yang berfokus pada penguatan penegakan dan pelayanan hukum yang berkeadilan, serta oleh Kementerian Pertanian dengan nilai Rp286,78 miliar yang ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian. Secara umum, sebagian besar kementerian/lembaga juga memiliki Program Dukungan Manajemen untuk memastikan tata kelola internal yang efektif.

2) Belanja Berdasarkan Fungsi

Belanja negara dibagi menjadi 11 fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Pembagian APBN berdasarkan fungsi ini dapat memperlihatkan peran APBN dalam melakukan alokasi sumber-sumber daya bagi perekonomian negara. Fungsi-fungsi ini merupakan penjabaran dari tugas negara sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945.

Grafik II. 7 Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Tahun 2025



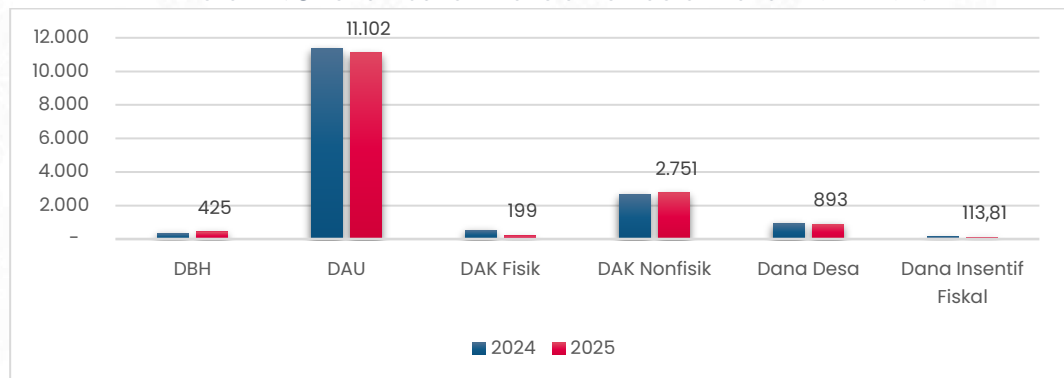
Sumber: Sintesa, diolah

Berdasarkan Grafik di atas, pagu belanja pemerintah pusat dialokasikan paling besar pada fungsi Pelayanan Umum dengan total pagu Rp22,04 triliun, diikuti fungsi Pendidikan dan fungsi Ekonomi dengan pagu masing-masing sebesar Rp3,46 triliun dan Rp2,45 triliun. Fungsi Pelayanan Umum mendapat alokasi terbesar dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kapasitas birokrasi, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang memiliki pagu terkecil adalah fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp 22,69 miliar.

b. Belanja Transfer ke Daerah (TKD)

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Triwulan III-2025 di Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp15,48 triliun atau 76,57 persen dari alokasi pagu tahun 2025 sebesar Rp20,22 triliun. Capaian ini tumbuh negatif sebesar 3,01 persen dibandingkan Triwulan III-2024 yang terealisasi sebesar Rp16,00 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp337,62 miliar, penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp239,16 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp42,94 miliar. Sementara itu terdapat peningkatan pada realisasi DAK Nonfisik dan DBH masing-masing sebesar Rp83,48 miliar dan Rp80,05 miliar atau meningkat 3,13 persen dan 23,19 persen (yoy).

Grafik II. 8 Pertumbuhan Transfer ke Daerah Tahun 2024–2025



Sumber: Sintesa, diolah

Pada triwulan III-2025, DAU telah disalurkan sebesar Rp11,10 triliun (80,92 persen dari pagu), turun 2,11 persen dibandingkan tahun lalu yang terealisasi Rp11,34 triliun. Secara umum penyaluran DAU di Sumatera Barat telah memenuhi ketentuan dan maksimal penyaluran. DAU *Block Grant* telah disalurkan sebesar 75 persen dari pagu atau senilai Rp8,77 triliun. Sementara itu, DAU *Specific Grant* terealisasi sebesar Rp1,36 triliun atau 66,99 persen dari pagu. Realisasi DAU terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang masing-masing

sebesar Rp1,70 triliun atau 15,30 persen dari total realisasi dan Rp982,27 miliar (8,85 persen), sedangkan realisasi terendah berasal dari Pemerintah Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang masing-masing sebesar Rp315,44 miliar (2,84 persen) dan Rp317,36 miliar atau 2,86 persen.

Tabel II. 3 Realisasi Transfer ke Daerah Triwulan III 2025 (dalam miliar Rp)

Nama Pemda	DAU	DBH	DAK	Dana	Insentif	Total
Kab. Agam	717,62	12,25	179,66	93,87	-	1.003,40
Kab. Dharmasraya	404,75	31,36	96,47	56,19	3,60	592,36
Kab. Kep. Mentawai	393,22	10,06	67,31	31,48	21,72	523,78
Kab. Lima Puluh Kota	605,10	20,66	152,71	75,73	-	854,21
Kab. Padang Pariaman	600,99	8,15	169,81	89,31	3,56	871,82
Kab. Pasaman	482,72	8,39	126,39	64,42	-	681,92
Kab. Pasaman Barat	544,46	20,26	151,84	74,75	-	791,31
Kab. Pesisir Selatan	727,78	17,23	200,20	145,15	-	1.090,37
Kab. Solok	580,84	8,04	181,38	63,92	-	834,18
Kab. Sijunjung	425,53	21,79	116,59	36,18	6,99	607,07
Kab. Solok Selatan	341,89	34,66	88,97	39,44	7,29	512,25
Kab. Tanah Datar	557,34	8,57	180,17	67,55	16,40	830,03
Kota Bukittinggi	379,18	9,29	51,62	-	-	440,10
Kota Padang	982,27	60,40	273,25	-	8,19	1.324,10
Kota Padang Panjang	317,36	5,61	26,12	-	-	349,10
Kota Pariaman	323,90	6,34	46,43	40,73	6,96	424,35
Kota Payakumbuh	371,22	6,71	64,95	-	8,67	451,55
Kota Solok	332,04	5,96	37,91	-	10,46	386,37
Kota Sawahlunto	315,44	20,62	35,02	14,43	4,38	389,89
Prov. Sumatera Barat	1.698,48	108,95	703,31	-	15,59	2.526,34
TOTAL	11.102,14	425,30	2.950,10	893,13	113,81	15.484,48

Sumber: OMSPAN TKD,, diolah

Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan hingga Triwulan III-2025 mencapai Rp425,30 miliar (64,27 persen dari pagu). DBH terbesar yang disalurkan adalah DBH PPh Pasal 21 dan DBH PBB Kabupaten/Kota masing-masing sebesar Rp194,00 miliar dan Rp84,01 miliar, sedangkan DBH terkecil disalurkan kepada DBH Cukai sebesar Rp1,58 miliar. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga akhir September 2025 tersalurkan sebesar Rp2,95 triliun atau 63,53 persen pagu, yang terbagi menjadi DAK Fisik dan DAK Nonfisik dengan jumlah penyaluran sebesar Rp198,62 miliar dan Rp2,75 triliun. Sementara itu, DAK Nonfisik terbesar berasal dari penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp1,21 triliun dan terkecil digunakan untuk Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah senilai Rp1,55 miliar.

Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp893,13 miliar (84,71 persen dari pagu) hingga Triwulan III-2025 dan turun 4,59 persen dibandingkan tahun lalu. Dana Desa telah disalurkan ke seluruh Pemda di Sumatera Barat dengan rincian Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non-Earmark*) yang terealisasi untuk Tahap I sebesar 188,62 miliar dan Tahap II sebesar Rp135,05 miliar,

serta Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*) yang terealisasi untuk Tahap I sebesar 396,52 miliar dan Tahap II sebesar Rp172,94 miliar. Dari total 1.035 desa/nagari di Sumatera Barat, seluruhnya telah merealisasikan Dana Desa Tahap I dan untuk Tahap II tersisa 16 desa yang belum disalurkan Dana Desa *Earmark* dan 346 desa yang belum memperoleh Dana Desa *Non-Earmark*.

Dana Insentif Fiskal telah terealisasi sebesar Rp113,81 miliar atau 79,04 persen dari total pagu pada 12 Pemda di Sumatera Barat. Realisasi Dana Insentif Fiskal terbesar terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Tanah Datar masing-masing sebesar Rp21,71 miliar, Rp16,40 miliar. Sementara itu, daerah yang telah disalurkan dana insentif fiskal terkecil adalah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Dharmasraya masing-masing dengan nilai Rp3,56 miliar dan Rp3,60 miliar.

2.1.3 Surplus/Defisit

Pada Triwulan III-2025 Sumatera Barat mengalami Defisit APBN sebesar Rp16,57 triliun. Nilai Defisit ini mengalami penurunan sebesar 14,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp19,45 triliun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan belanja yang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan. Secara nominal, Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp2,09 triliun, sedangkan Pendapatan Negara naik sebesar Rp804,31 miliar. Pertumbuhan Pendapatan tertahan oleh adanya kontraksi pada komponen PPN, PPh, Bea Masuk dan PNPB Lainnya.

2.1.4 Prognosis APBN

Prognosis Pendapatan Negara pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 di Provinsi Sumatera Barat adalah masing-masing sebesar Rp564,92 miliar, Rp612,33 miliar, dan Rp708,58 miliar. Dengan demikian total Pendapatan Negara di Sumatera Barat pada Triwulan IV diproyeksikan mencapai Rp1,89 triliun. Jumlah ini terdiri dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1,22 triliun, Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp182,14 miliar, dan Penerimaan PNPB sebesar Rp479,72 miliar.

Sementara itu, Prognosis Belanja Negara pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 masing-masing sebesar Rp3,18 triliun, Rp2,09 triliun, dan Rp3,35 triliun. Dengan demikian, realisasi Belanja Negara sampai dengan Triwulan IV-2025 diperkirakan mencapai Rp8,62 triliun. Jumlah ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,54 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp5,08 triliun. Perhitungan ini diperoleh dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari realisasi selama lima tahun terakhir.



Tabel II. 4 Prognosis APBN Wilayah Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2025

Uraian	Target	Real. s.d. TW III	Prognosis per Bulan			Prognosis TW IV	% Thd Target
			Okt	Nov	Des		
PENDAPATAN NEGARA	7.688,28	5.986,17	547,95	526,04	629,69	7.689,85	100,02
Pendapatan Perpajakan	6.064,56	4.446,97	399,59	378,39	445,98	5.670,93	93,51
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.623,72	1.539,2	148,36	147,65	183,71	2.018,92	124,34
BELANJA NEGARA	32.179,93	22.553,65	2.470,57	2.691,44	2.856,59	3.0572,25	95,00
Belanja Pemerintah Pusat	11.956,46	7.069,17	868,55	774,44	1.899,59	10.611,75	88,75
Transfer ke Daerah	20.223,47	15.484,48	1.602,02	1.917,00	957,00	19.960,50	98,70
SURPLUS/(DEFISIT) REGIONAL		(24.491,65)	(16.567,48)	(1.922,62)	(2.165,40)	(2.226,89)	(22.882,40)

2.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

Tabel II. 5 I-Account APBD Konsolidasi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2024 dan 2025 (Rp M)

I-Account (dalam Miliar Rp)	TA 2024			TA 2025			Growth
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
PENDAPATAN DAERAH	27.775,59	19.280,14	69,41%	27.985,93	19.575,00	69,95%	1,53%
PAD	5.880,19	3.925,07	66,75%	6.129,98	4.362,48	71,17%	11,14%
Pendapatan Transfer	21.840,32	15.343,31	70,25%	21.060,20	15.199,02	72,17%	-0,94%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	55,08	11,76	21,36%	36,75	13,50	36,75%	14,80%
BELANJA DAERAH	29.497,98	17.156,37	58,16%	29.180,02	16.203,73	55,53%	-5,55%
Belanja Operasi	22.854,51	14.438,37	63,18%	22.947,76	13.878,15	60,48%	-3,88%
Belanja Pegawai	13.657,82	9.146,74	66,97%	14.720,45	9.479,93	64,40%	3,64%
Belanja Barang dan Jasa	7.876,72	4.387,47	55,70%	7.616,08	4.057,27	53,27%	-7,53%
Belanja Bunga	8,01	6,08	75,97%	8,01	4,18	52,13%	-31,37%
Belanja Subsidi	58,57	23,08	39,41%	57,10	40,66	71,21%	76,17%
Belanja Hibah	1.201,22	854,70	71,15%	513,77	284,96	55,46%	-66,66%
Belanja Bantuan Sosial	52,17	20,29	38,90%	32,35	11,15	34,48%	-45,03%
Belanja Modal	3.132,61	1.221,33	38,99%	2.945,11	840,33	28,53%	-31,20%
Belanja Modal	3.132,61	1.221,33	38,99%	2.945,11	840,33	28,53%	-31,20%
Belanja Tidak Terduga	153,64	29,34	19,10%	147,24	14,13	9,60%	-51,84%
Belanja Tidak Terduga	153,64	29,34	19,10%	147,24	14,13	9,60%	-51,84%
Belanja Transfer	3.357,22	1.467,33	43,71%	3.139,91	1.471,13	46,85%	0,26%
Belanja Bagi Hasil	1.306,42	52,17	3,99%	1.058,78	29,14	2,75%	-
Belanja Bantuan Keuangan	2.050,80	1.415,16	69,01%	2.081,13	1.441,99	69,29%	1,90%
SURPLUS/(DEFISIT)	(1.722,39)	2.123,77	-123,30%	(1.194,09)	3.371,26	-282,33%	58,74%
PEMBIAYAAN	1.722,39	909,36	52,80%	1.194,09	727,57	60,93%	-19,99%
Penerimaan Pembiayaan	1.811,85	973,52	0,54	1.296,03	756,63	0,58	(0,22)
Pengeluaran Pembiayaan	89,46	64,16	0,72	101,94	29,06	0,29	(0,55)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)							

Sumber: GFS Sumbar, data diolah

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera Barat sampai dengan triwulan III-2025 menunjukkan pertumbuhan positif di sisi Pendapatan Daerah. Namun, pada Belanja Daerah juga menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan

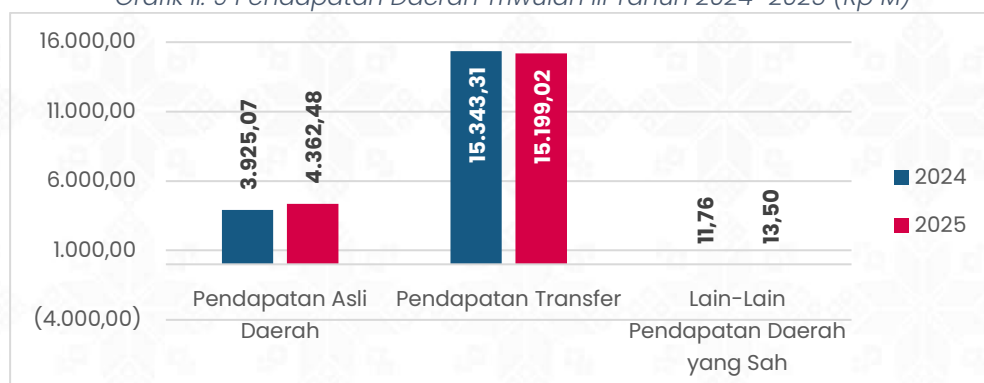
triwulan III-2024. Secara ringkas, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 30 September 2025 tercatat sebesar Rp19,58 triliun (69,95 persen dari target), tumbuh tipis sebesar 1,53% persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp16,20 triliun (55,53 persen dari pagu), turun 5,55 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan selisih realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, maka terjadi Surplus APBD sebesar Rp3,37 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp727,57 miliar.

2.2.1 Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sampai dengan triwulan III-2025, Pendapatan Transfer masih menjadi sumber penerimaan utama daerah, dengan kontribusi sebesar 77,65 persen terhadap total Pendapatan Daerah. Sementara PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 22,29 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berkontribusi sebesar 0,07 persen.

Grafik II. 9 Pendapatan Daerah Triwulan III Tahun 2024–2025 (Rp M)



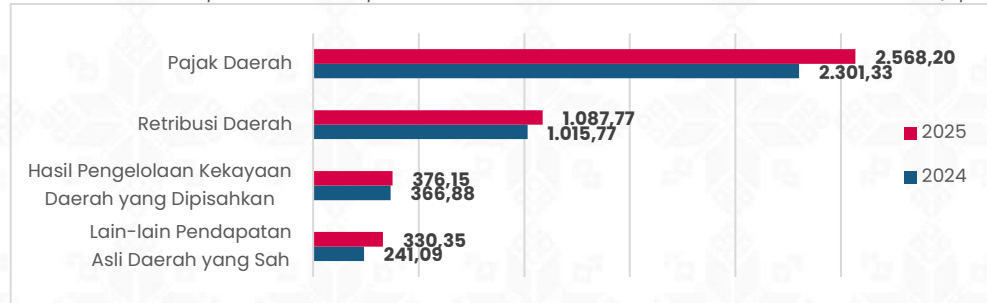
Sumber: GFS Sumbar, data diolah

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi PAD, maka kemandirian pemerintah daerah tersebut dinilai semakin tinggi. Tingkat kemandirian Sumatera Barat masih terbilang rendah, yang ditandai dengan belum optimalnya peran PAD terhadap total pendapatan daerah, perlu menjadi perhatian.

Realisasi PAD di Sumatera Barat sampai dengan triwulan III-2025, tercatat sebesar Rp4,36 triliun atau 71,17 persen dari target. Kinerja PAD mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 11,14 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh kenaikan yang pada pendapatan komponen Pajak Daerah dengan pertumbuhan sebesar 8,72 persen dengan capaian Rp2,57 triliun yang didorong oleh kenaikan setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB)

dengan realisasi mencapai Rp701,83 miliar, diikuti oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp526,36 miliar. Sementara itu, Retribusi Daerah tumbuh sebesar 7,09 persen atau tercapai sebesar Rp1,09 triliun. Retribusi Daerah didominasi oleh kenaikan retribusi pada pelayanan kesehatan. Sedangkan Hasil Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh 2,53 persen atau sebesar Rp376,15 miliar yang didominasi pembagian dividen BUMD dan Lain-lain PAD yang Sah tumbuh 37,02 persen atau sebesar Rp330,35 miliar dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan BLUD.

Grafik II. 10 Komponen Pendapatan Asli Daerah Triwulan III Tahun 2024–2025 (Rp M)



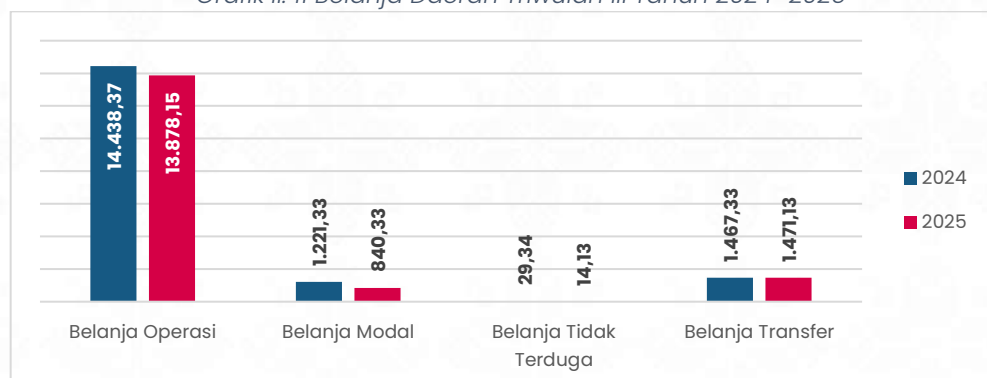
Sumber: GFS Sumbar, data diolah

Sementara itu, Pendapatan Transfer yang terealisasi hingga triwulan III-2025 adalah sebesar Rp15,20 triliun atau mencapai 72,17 persen dari target tahun 2025. Realisasi tersebut berkontraksi sebesar 0,94 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, khususnya realisasi Dana Alokasi Umum yang berkurang Rp64,63 miliar (turun 0,58 persen) dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) yang berkurang Rp37,78 miliar (turun 21,17 persen).

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah terealisasi hingga triwulan III-2025 adalah sebesar Rp13,5 miliar atau masih 36,75 persen dari target. Realisasi tersebut relatif naik sebesar 14,80 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini didorong oleh kenaikan jumlah hibah dari masyarakat.

2.2.2 Belanja Daerah

Grafik II. 11 Belanja Daerah Triwulan III Tahun 2024–2025



Sumber: GFS Sumbar, data diolah

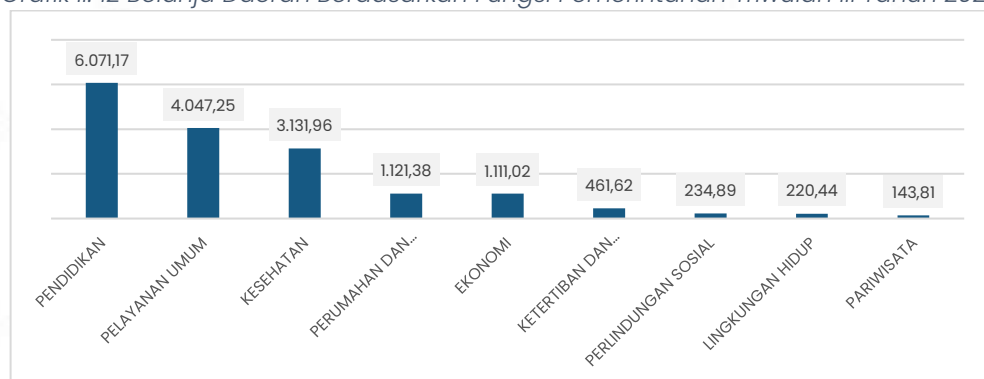
Dari keempat komponen, Belanja Daerah masih didominasi oleh Belanja Operasi dengan realisasi mencapai Rp13,88 triliun atau mencapai 60,48 persen dari total Belanja Daerah di Sumatera Barat. Belanja Pegawai masih mendominasi dengan realisasi sebesar Rp9,48 triliun dan mengambil porsi sebesar 68,31 persen terhadap total Belanja Operasi atau 58,50 persen terhadap total Belanja Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio Belanja Pegawai masih relatif tinggi di Sumatera Barat. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD, sehingga belanja daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik.

Komponen Belanja Operasi yang mengalami pertumbuhan tertinggi yakni Belanja Pegawai yang naik sebesar 3,64 persen dibandingkan triwulan III-2024, didorong oleh peningkatan realisasi gaji dan tunjangan ASN daerah. Komponen Belanja Operasi dengan kontraksi paling dalam yakni Belanja Hibah yang turun 66,66 persen, utamanya disebabkan oleh penurunan hibah kepada pemerintah pusat dan organisasi kemasyarakatan.

Belanja Modal mengalami kontraksi sebesar 31,20 persen dibandingkan tahun lalu, didominasi penurunan belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan sebesar 47,98 persen. Realisasi Belanja Modal hingga triwulan III-2025 adalah sebesar Rp840,33 miliar atau baru terserap 28,53 persen dari total alokasi pagu 2025. Nilai realisasi tertinggi terdapat pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp312,73 miliar, diikuti oleh Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp271,86 miliar.

Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan triwulan III-2025 adalah senilai Rp14,13 miliar (9,60 persen dari pagu), yang merupakan cadangan keuangan yang disiapkan Pemda untuk hal-hal darurat dan tidak direncanakan. Sedangkan realisasi Belanja Transfer adalah sebesar Rp1,47 triliun (46,85 persen dari pagu) yang merupakan transfer bagi hasil dan bantuan keuangan ke desa dan kabupaten/kota.

Grafik II. 12 Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Pemerintahan Triwulan III Tahun 2025



Sumber: GFS Sumbar, data diolah

Jika dirinci berdasarkan fungsi pemerintahan, Belanja Daerah di Sumatera Barat sampai dengan triwulan III-2025 paling banyak terealisasi untuk fungsi pendidikan yakni senilai Rp6,07 triliun. Realisasi belanja untuk fungsi Pendidikan mencapai 36,70 persen dari total keseluruhan Belanja Daerah. Belanja pelayanan umum mendapatkan porsi 24,46 persen atau senilai Rp4,05 triliun dan belanja kesehatan berkontribusi 18,93 persen dari total belanja daerah dengan capaian Rp3,13 triliun. Adapun fungsi-fungsi pemerintahan yang lainnya hanya mendapatkan porsi di bawah 7 persen. Porsi terkecil terdapat pada belanja pariwisata sebesar 0,87 persen atau senilai Rp143,81 miliar.

2.2.3 Surplus/Defisit APBD

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, maka hingga akhir triwulan III-2025 terdapat Surplus APBD sebesar Rp3,37 triliun. Nilai Surplus ini mengalami peningkatan sebesar 58,74 persen dibandingkan APBD periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan Surplus sebesar Rp2,12 triliun, yang menandakan jumlah *idle cash* di RKUD Pemda semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, Pemda harus lebih mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah yang masih di bawah kinerja Pendapatan Daerah. Persentase realisasi Belanja Daerah sebesar 55,53 persen masih lebih kecil dari persentase realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai 71,90 persen.

2.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan neto di Sumatera Barat pada triwulan III-2025 tercatat sebesar Rp727,57 miliar, yang berkontraksi sebesar 19,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara rinci, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp756,63 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp29,06 miliar. Sumber Penerimaan Pembiayaan daerah Sebagian besar berasal dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya yakni Rp756,29 miliar. Sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan didominasi penyertaan modal pada BUMN sebesar Rp8,8 miliar, pada BUMD sebesar Rp1,50 miliar, dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp18,75 miliar.



2.2.5 Prognosis APBD

Tabel II. 6 Prognosis APBD Wilayah Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025

Uraian	Persentase Realisasi s.d. TW IV					Rata-rata	Pagu 2025	Proyeksi
	2020	2021	2022	2023	2024			
PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH								
Pendapatan Asli Daerah	97,53%	96,08%	97,43%	90,84%	89,07%	94,19%	6.129,98	5.773,70
Pendapatan Transfer	97,54%	99,04%	96,75%	98,16%	99,26%	98,15%	21.060,20	20.670,48
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	90,45%	86,58%	95,16%	68,59%	3,21%	68,80%	36,75	25,28
Total Proyeksi Pendapatan Daerah								26,469,46
BELANJA DAERAH								
Belanja Operasi	93,87%	91,78%	92,00%	90,89%	90,73%	91,85%	22.947,76	21.078,58
Belanja Modal	88,40%	79,91%	84,84%	89,07%	91,31%	86,71%	2.945,11	2.553,60
Belanja Tak Terduga	78,40%	53,51%	20,00%	46,34%	45,32%	48,71%	147,24	71,73
Belanja Transfer	99,09%	99,37%	97,91%	98,45%	59,46%	90,86%	3.139,91	2.852,81
Total Proyeksi Belanja Daerah								26.556,71

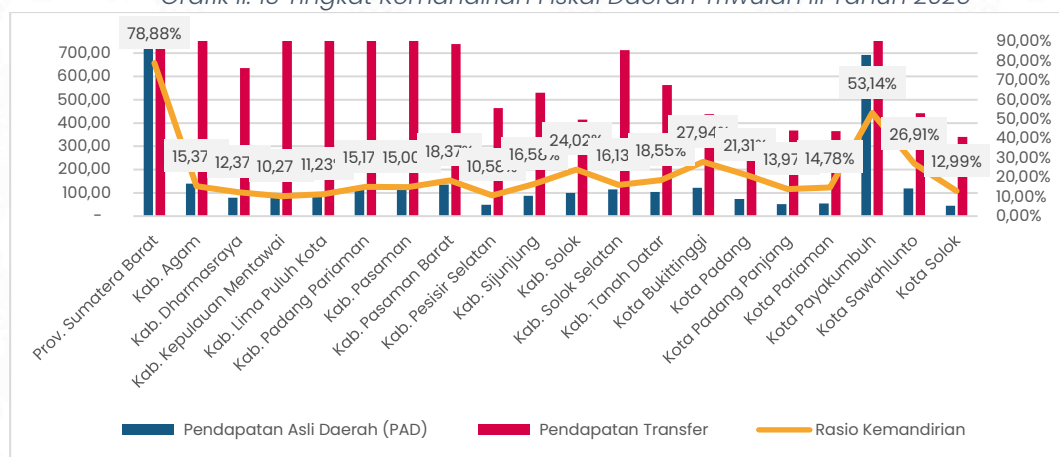
Sumber: GFS Sumbar, data diolah

Proyeksi realisasi APBD dihasilkan dari perhitungan rata-rata realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan, sampai dengan triwulan IV-2025, Pendapatan Daerah diproyeksikan terealisasi sebesar Rp26,47 triliun (97,22 persen dari target) dan Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp26,56 triliun (91,01 persen dari alokasi pagu).

2.2.6 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian Fiskal Daerah merepresentasikan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan serta urusan pemerintahannya sendiri. Rasio kemandirian daerah dapat diukur dengan perhitungan proporsi PAD terhadap Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemda berkenaan.

Grafik II. 13 Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Triwulan III Tahun 2025



Sumber: GFS Sumbar, data diolah

Kategori	Rasio (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Berdasarkan data realisasi APBD sampai dengan triwulan III-2025, sebagian besar Pemda di Sumatera Barat masih belum mandiri secara fiskal. Terdapat 16 kab/kota dengan kategori rasio kemandirian “rendah sekali” dan 2 kab/kota dengan kategori

“rendah”. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri memiliki rasio kemandirian sebesar 78,88 persen yang tergolong kategori “tinggi”. Daerah kab/kota dengan tingkat kemandirian tertinggi adalah Kota Payakumbuh dengan rasio 53,14 persen dan yang terendah adalah Kab. Kepulauan Mentawai dengan rasio 10,27 persen.

2.2.7 Rasio Pajak Daerah (*Local Tax Ratio*)

Rasio Pajak Daerah merupakan perbandingan pajak daerah terhadap pendapatan perekonomian daerah yang direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Realisasi Pajak Daerah konsolidasi di Sumatera Barat sampai dengan triwulan III-2025 adalah senilai Rp2,57 triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Sumatera Barat triwulan III-2025 mencapai Rp88,31 triliun, sehingga menghasilkan Rasio Pajak Daerah sebesar 2,91 persen. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa *local taxing power* di Sumatera Barat mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding triwulan sebelumnya. Sejalan dengan penerapan UU HKPD, Pemerintah Daerah didorong untuk meningkatkan rasio pajak daerah dengan target mencapai level 3 persen dan Sumatera Barat sudah mendekati target tersebut.

BAB III

ANALISIS TEMATIK

Tarian ini diiringi oleh kombinasi alat musik talempong dan saluang. Tempo alunan musik awalnya lembut dan teratur, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi lebih cepat. Gerakan dalam tari piring ini merupakan salah satu unsur penting untuk menjadikan tarian menjadi bentuk yang bermutu. Tari Piring ini bersumber dari beberapa gerakan, seperti: Gerakan dasar pencak silat, alang babega, tupai bagaluik, bungo kambang, dan lain sebagainya.

Foto: Erison J Kambari

BAB III

ANALISIS TEMATIK

3.1 Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)

3.1.1 Strategi Pelaksanaan Kegiatan MBG

Program MBG dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lintas sektor dari tingkat pusat hingga sekolah dan posyandu. Di tingkat pusat, Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait pendidikan, agama, kesehatan, pemerintahan daerah, desa, kelautan dan perikanan, keuangan, perencanaan pembangunan, koperasi, dan UMKM.

Strategi utama pelaksanaan meliputi: (1) pembentukan dan pengembangan SPPG secara bertahap hingga 5.000 SPPG pada Juli 2025 di 38 provinsi; (2) kolaborasi dengan instansi pemerintah, TNI/Polri, dan pihak ketiga dalam pendirian dan pengelolaan SPPG; (3) penguatan koordinasi SPPG dengan pemangku kepentingan di kecamatan/kelurahan/desa sampai ke satuan pendidikan, puskesmas, dan posyandu dalam radius pelayanan; serta (4) memastikan pasokan bahan pangan melalui pelibatan koperasi dan pelaku produksi pangan seperti petani, peternak, dan nelayan.

3.1.2 Standar Gizi MBG

Dalam penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG), SPPG mengacu pada Standar Gizi sesuai yang tercantum dalam tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Harian menurut kelompok umur sasaran. Kebutuhan gizi ini dihitung berdasarkan waktu pemberian MBG.

Tabel III. 1 Rujukan Angka Kecukupan Gizi Harian Menurut Kelompok Umur Sasaran

No	Kel Sasaran	Energi (kkal)	Energi (kkal)	Protein (gr)	Lemak (gr)	Karbohidrat (gr)	Waktu Pemberian	Rujukan % AKG
1	Siswa TK/PAUD	328	23,4	25,0	23,7	20,9	Makan pagi	20-25% AKG Harian
2	Siswa SD/MI (kelas 1-3)	368,8	22,3	23,1	24,1	20,1	Makan pagi	20-25% AKG Harian
3	Siswa SD/MI (kelas 4-6)	531	32,2	33,1	30,9	31,0	Makan siang	30-35% AKG Harian
4	Siswa SMP/MTs	719	32,3	34,8	30,7	30,8	Makan siang	30-35% AKG Harian
5	Siswa SMA/SMK/MA	762,5	32,1	36,4	31,0	30,4	Makan siang	30-35% AKG Harian
6	SLB	Mengikuti kebutuhan gizi sesuai kelompok usia						
7	Ibu Hamil	818	33,3	40,4	32,1	31,9	Makan siang	30-35% AKG Harian
8	Ibu Menyusui	818	31,9	52,9	32,2	30,8	Makan siang	30-35% AKG Harian
9	Anak Balita	342	24,4	47,6	21,6	20,6	Makan siang	30-35% AKG Harian

Sumber : Perhitungan Standar Gizi MBG Peraturan Kementerian Kesehatan No. 28/2019

3.1.3 Pelaksanaan Program MBG Provinsi Sumatera Barat

Sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam upaya meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan mendukung ketahanan pangan, Provinsi Sumatera Barat turut mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk memberikan asupan makanan sehat dan bergizi kepada peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA, secara bertahap dan terencana.

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 634 Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) di seluruh Sumatera Barat. Namun hingga September 2025, baru terdapat 231 SPPG yang telah aktif beroperasi di 18 Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, jumlah siswa penerima manfaat MBG telah mencapai 622.215 penerima. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): menjangkau 1.005 kelompok.
- Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI): menjadi segmen penerima terbanyak, yakni 3.016 kelompok sekolah.
- Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs): sebanyak 454 sekolah.
- Sekolah Menengah Atas (SMA): baru menjangkau 164 sekolah.

Meskipun pelaksanaan program MBG telah dimulai di beberapa wilayah, realisasi ini masih tergolong tahap awal dari keseluruhan target provinsi. Seiring dengan perkembangan, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan logistik, terbatasnya fasilitas dapur umum yang memenuhi standar, serta perlunya penguatan pengawasan standar kebersihan dalam proses penyajian makanan.

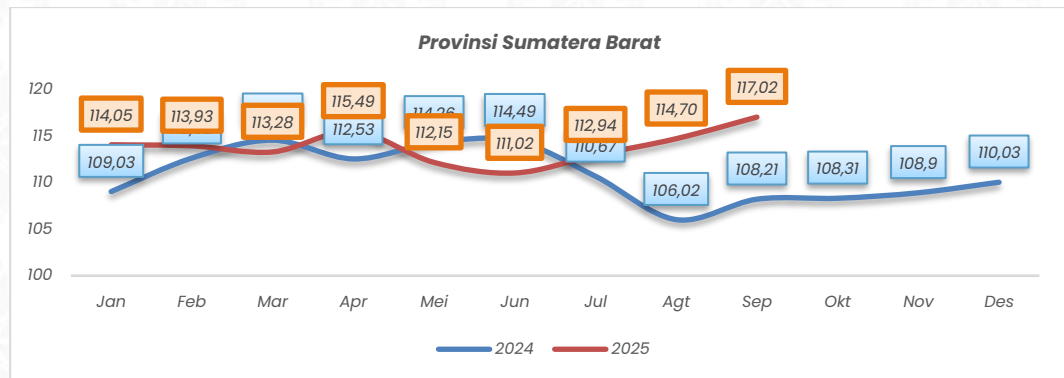
Namun demikian, semangat pelaksanaan tetap tinggi. Program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki gizi siswa, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan multidimensi, khususnya pada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Diharapkan, dengan dukungan lintas sektor dan percepatan pembentukan SPPG baru, Program MBG di Sumatera Barat akan mencapai target yang lebih luas dan berkelanjutan pada akhir tahun 2025.

3.1.4 Dampak Indikasi Awal Program MBG

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan III tahun 2025 menunjukkan pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), khususnya pada kelompok makanan dan minuman pada Grafik III.1, di mana tercatat adanya kenaikan secara berkelanjutan sejak Juli hingga mencapai puncaknya pada

bulan September 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa Program MBG memberikan dampak yang menandakan Program MBG tidak hanya membantu akses konsumsi masyarakat, tetapi juga memicu peningkatan permintaan yang berdampak pada tekanan harga di kelompok makanan-minuman serta efek jangka panjang yang menunjukkan adanya stimulus positif terhadap aktivitas ekonomi konsumsi rumah tangga.

Grafik III. 1 Indeks Harga Konsumen Makanan dan Minuman Sumatera Barat



Apabila ditinjau lebih rinci berdasarkan data dari empat daerah utama pelaksanaan program yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya, terlihat bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok makanan dan minuman di seluruh wilayah tersebut menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan sejak Juli hingga mencapai puncaknya pada September 2025, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

Secara lebih rinci, Kota Padang mencatat peningkatan IHK dari 112,22 pada Juli menjadi 115,06 pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami penurunan hingga 106,75. Kota Bukittinggi menunjukkan kenaikan serupa dari 109,62 pada Juni menjadi 116,31 pada September 2025, melampaui capaian 107,51 pada 2024. Kabupaten Pasaman Barat mengalami lonjakan tertinggi, di mana IHK meningkat dari 114,22 pada Juli menjadi 120,72 pada September 2025, sementara Kabupaten Dharmasraya mencatat peningkatan yang relatif stabil dari 114,71 pada Juli menjadi 118,85 pada September 2025, jauh di atas level tahun sebelumnya (103,49 pada periode yang sama).

Kenaikan tersebut mencerminkan adanya tekanan permintaan (*demand-pull inflation*) yang bersumber dari pelaksanaan Program MBG. Aktivitas pengadaan dan distribusi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ribuan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sejumlah komoditas utama seperti beras, telur, daging ayam ras, dan sayuran segar. Peningkatan permintaan ini tidak diimbangi oleh

pasokan yang memadai, sehingga menimbulkan tekanan kenaikan harga di pasar lokal.

Secara ekonomi, fenomena ini mengindikasikan bahwa Program MBG berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi konsumsi rumah tangga, khususnya pada sektor pangan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan IHK di wilayah pelaksana program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Makanan Bergizi Gratis memberikan dampak jangka pendek berupa kenaikan harga pangan akibat peningkatan permintaan, sekaligus dampak jangka panjang berupa penguatan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi lokal di wilayah Sumatera Barat.

Selama pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di triwulan III tahun 2025, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) di Provinsi Sumatera Barat tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa MBG memberi dampak positif terhadap usaha pertanian. Pada triwulan III 2025 (Juli-September), NTUP rata-rata mencapai 134,89, meningkat signifikan sebesar 6,93 poin atau 5,42 persen dibandingkan dengan rata-rata NTUP pada triwulan III 2024 yang sebesar 127,96 (125,96 di Juli, 126,31 di Agustus, dan 126,28 di September).

Peningkatan ini terjadi karena petani bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga yang lebih menguntungkan. Saat permintaan terhadap bahan pangan meningkat karena adanya program MBG, otomatis harga jual hasil tani ikut terdorong naik. Di sisi lain, biaya produksi yang dikeluarkan petani tidak naik sebesar kenaikan harga jual, sehingga petani mendapat keuntungan lebih besar. Kondisi ini menjelaskan mengapa NTUP meningkat dan menandakan bahwa program MBG tidak hanya menyehatkan masyarakat penerima bantuan, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi para petani.

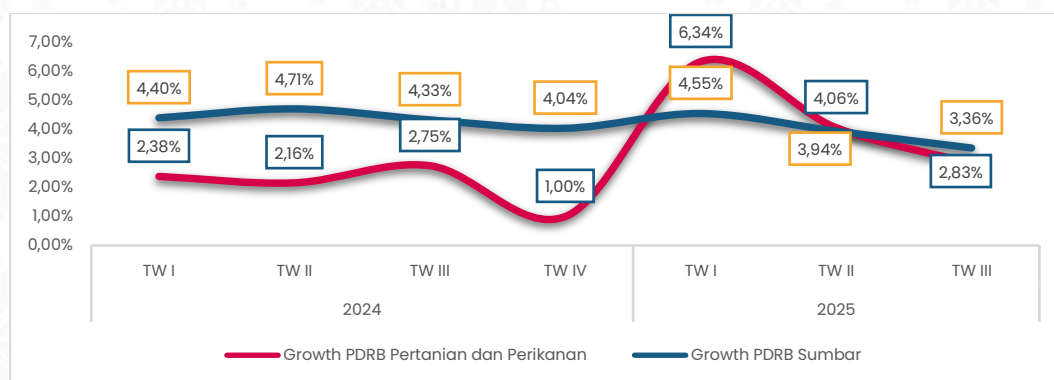
Selain petani, nelayan di Sumatera Barat juga merasakan dampak positif dari program MBG pada triwulan III tahun 2025. Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan periode triwulan III 2024. Secara rata-rata, NTUN pada triwulan III 2025 (Juli-September) mencapai 111,87, meningkat drastis sebesar 18,74 poin atau 20,13 persen dibandingkan dengan rata-rata NTUN pada triwulan III 2024 yang hanya sebesar 93,13 (91,89 di Juli, 93,81 di Agustus, dan 93,70 di September).

Bahkan, pada bulan September 2025, NTUN berhasil mencapai angka tertinggi sebesar 116,16, yang artinya pendapatan para nelayan sudah lebih besar dari pengeluaran mereka untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional. Kenaikan ini bisa terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap hasil laut, seperti ikan dan produk olahan lainnya, yang menjadi bagian dari menu makanan bergizi. Artinya, MBG tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat



penerima bantuan makanan, tapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi nelayan dengan meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kesejahteraan mereka.

Grafik III. 2 Laju Output Lapangan Usaha Pertanian dan Perikanan (% yoy)



Grafik di atas menunjukkan tren pertumbuhan PDRB Total dan sektor Pertanian dan Perikanan (% yoy) di Provinsi Sumatera Barat dari Triwulan I 2024 hingga Triwulan III 2025. Terlihat bahwa sepanjang tahun 2024, laju pertumbuhan sektor Pertanian dan Perikanan relatif stagnan dan berada di bawah pertumbuhan PDRB total. Bahkan pada Triwulan IV 2024, sektor ini hanya tumbuh sebesar 1,00 persen angka terendah selama periode tersebut.

Namun, kondisi tersebut berubah drastis pada Triwulan I 2025, di mana sektor Pertanian dan Perikanan mencatat lonjakan pertumbuhan hingga 6,34 persen, jauh melampaui pertumbuhan PDRB total yang sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan tinggi ini bertepatan dengan implementasi awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Program MBG yang menyasar ribuan peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA menciptakan peningkatan permintaan terhadap bahan pangan lokal, khususnya produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan seperti beras, sayur-mayur, telur, daging ayam, dan ikan. Dorongan permintaan tersebut menjadi insentif bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produksi dan distribusi, yang secara langsung berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan.

Meski pada Triwulan III 2025 terjadi penurunan pertumbuhan sektor pertanian menjadi 2,83 persen, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan capaian sepanjang tahun 2024. Penurunan ini lebih disebabkan oleh proses penyesuaian logistik dan stabilisasi pasar setelah lonjakan awal permintaan pada fase awal pelaksanaan program. Dalam periode yang sama, pertumbuhan PDRB total juga tetap solid di angka 3,36 persen, menunjukkan bahwa Program MBG turut memberikan efek pengganda terhadap perekonomian daerah secara umum.

3.1.5 Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Program MBG Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Barat hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian positif dalam perluasan cakupan dan peningkatan partisipasi satuan pendidikan, namun masih menghadapi sejumlah isu strategis dalam implementasinya. Salah satu permasalahan utama berkaitan dengan kesiapan rantai pasok bahan pangan lokal, terutama di daerah yang jauh dari pusat distribusi. Peningkatan permintaan bahan pokok seperti beras, telur, dan daging ayam yang terjadi secara simultan di beberapa kabupaten/kota menyebabkan terjadinya tekanan harga dan gangguan pasokan di pasar tradisional. Kondisi ini berimplikasi pada naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok makanan dan minuman di sejumlah daerah, terutama sejak bulan Juli hingga September 2025.

Selain itu, aspek tata kelola dan koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan yang menonjol. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah penguatan kelembagaan, namun sinkronisasi antara dinas pendidikan, dinas sosial, dan penyedia pangan lokal belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa sekolah melaporkan keterlambatan dalam proses distribusi bahan makanan serta ketidaksesuaian antara menu bergizi yang direncanakan dan ketersediaan bahan di lapangan. Hambatan administratif, seperti mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang belum seragam, juga menghambat efektivitas pelaksanaan program, khususnya di daerah dengan kapasitas manajerial terbatas.

Dari sisi sosial dan ekonomi, muncul pula isu keberlanjutan dan pemerataan manfaat program di seluruh wilayah Sumatera Barat. Daerah perkotaan seperti Padang dan Bukittinggi cenderung lebih cepat beradaptasi dengan sistem pengadaan dan distribusi, sedangkan daerah dengan infrastruktur terbatas seperti Pasaman Barat dan Dharmasraya masih menghadapi kendala logistik dan keterbatasan fasilitas penyimpanan bahan pangan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan efektivitas program antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan manajemen rantai pasok lokal, peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat daerah, serta sistem *monitoring* terpadu untuk memastikan bahwa Program MBG tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi peserta didik di Sumatera Barat.



3.2 Analisis Pengaruh DAU dan DAK Fisik terhadap Capaian Standar Pelayanan Minimal

3.2.1 Pendahuluan

Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 telah mengesahkan APBN 2026 yang memuat agenda konsolidasi fiskal, antara lain melalui penyesuaian, termasuk potensi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Bagi sebagian besar pemerintah daerah, hingga sekitar 70 persen pendapatan daerah bersumber dari pendapatan transfer, sementara kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Kondisi ini menjadikan TKD bukan sekadar tambahan, tetapi tulang punggung kapasitas fiskal daerah untuk membiayai program prioritas, terutama layanan dasar.

Penyempitan ruang fiskal akibat pemotongan TKD berpotensi mengganggu kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang telah diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM menetapkan jenis dan mutu layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah di enam urusan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Tingkat pencapaian SPM merefleksikan sejauh mana masyarakat memperoleh layanan yang menjadi mandat konstitusional.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menyalurkan berbagai skema TKD, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pemda. Reformasi DAU menjadi *specific grant* yang dimulai beberapa tahun terakhir mengubah sebagian fungsi DAU dari sekadar "*block grant*" yang fleksibel menjadi instrumen yang lebih terikat pada fungsi tertentu, khususnya layanan dasar.

Provinsi Sumatera Barat, dengan 19 kabupaten/kota dan karakteristik geografis yang beragam (daratan, pegunungan, dan kepulauan), bergantung signifikan pada TKD untuk membiayai pelayanan dasar. Di sisi lain, masih terdapat kabupaten/kota dengan capaian SPM di bawah rata-rata, meskipun TKD yang diterima relatif besar. Dalam konteks itulah kajian ini menganalisis peran DAU dan DAK Fisik terhadap pencapaian SPM kabupaten/kota di Sumatera Barat, serta merefleksikan implikasinya terhadap rencana pemotongan TKD tahun 2026.

3.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan pokok, yaitu: bagaimana perkembangan DAU dan DAK Fisik per kapita riil kabupaten/kota di Sumatera Barat sepanjang 2021–2024, baik

secara agregat maupun antardaerah, serta bagaimana gambaran pencapaian SPM per urusan pelayanan dasar dan secara komposit beserta dinamika perubahannya pada periode yang sama. Kajian ini juga menganalisis sejauh mana DAU dan DAK Fisik per kapita riil berpengaruh terhadap pencapaian SPM komposit dengan memperhitungkan karakteristik fiskal dan sosial-ekonomi daerah (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan tipologi kota/kabupaten), serta menelaah adanya perbedaan pengaruh DAU terhadap SPM sebelum dan sesudah penerapan DAU *specific grant* dan implikasinya terhadap rencana pemotongan TKD tahun 2026.

3.2.3 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat merupakan provinsi di wilayah Sumatera dengan struktur wilayah yang beragam: daerah pesisir, pegunungan, dan kepulauan. Jumlah penduduk tersebar tidak merata, dengan kota-kota seperti Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Solok memiliki kepadatan tinggi, sementara daerah seperti Kepulauan Mentawai memiliki penduduk relatif sedikit tetapi biaya layanan publik tinggi.

Struktur ekonomi Sumatera Barat ditopang oleh sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, serta jasa-jasa. PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan bervariasi antar kabupaten/kota; beberapa daerah relatif sejahtera dengan kemiskinan rendah, sementara daerah tertinggal dan kepulauan menghadapi kemiskinan lebih tinggi.

Keragaman karakteristik tersebut berimplikasi pada kebutuhan dan biaya layanan dasar yang berbeda; Kapasitas fiskal dan PAD yang tidak seragam; dan Ketergantungan yang berbeda terhadap TKD sebagai sumber pembiayaan SPM. Sebagai konteks awal, Tabel 3.1 berikut menyajikan daftar pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat beserta status wilayah, jumlah penduduk, PDRB per kapita (harga konstan 2021), dan tingkat kemiskinan berdasarkan data tahun 2024.

Dari tabel III.2 tampak bahwa beban layanan dasar dan kapasitas ekonomi antar daerah di Sumatera Barat bervariasi cukup lebar. Kota Padang dan beberapa kabupaten seperti Agam, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman menanggung jumlah penduduk yang relatif besar, sementara sejumlah kota memiliki skala penduduk yang lebih kecil. PDRB per kapita cenderung lebih tinggi di beberapa kota seperti Bukittinggi dan Padang, sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi terlihat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan relatif rendah di beberapa kota seperti Sawahlunto dan Solok. Variasi ini menjadi penting dalam analisis berikutnya, karena perbedaan skala penduduk, kapasitas ekonomi, dan tingkat kemiskinan akan memengaruhi kebutuhan layanan dasar, ketergantungan terhadap TKD, dan kemampuan masing-masing daerah dalam mencapai SPM.

Tabel III. 2 Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Jumlah Penduduk, PDRB per Kapita, dan Tingkat Kemiskinan, Tahun 2024

No	Nama Pemerintah Daerah	Status	Jumlah Penduduk (jiwa)	PDRB per Kapita (Rp)	Tingkat Kemiskinan (%)
1	Kab. Agam	Kabupaten	559.300	30.299.660	6,23
2	Kab. Dharmasraya	Kabupaten	244.030	35.697.086	6,25
3	Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten	92.760	37.213.562	15,30
4	Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten	401.090	32.242.140	6,91
5	Kab. Padang Pariaman	Kabupaten	459.170	31.293.943	5,83
6	Kab. Pasaman	Kabupaten	318.080	22.473.183	6,29
7	Kab. Pasaman Barat	Kabupaten	456.470	28.922.711	7,58
8	Kab. Pesisir Selatan	Kabupaten	532.910	20.669.926	6,76
9	Kab. Sijunjung	Kabupaten	246.780	31.440.109	6,07
10	Kab. Solok	Kabupaten	410.430	27.868.016	6,87
11	Kab. Solok Selatan	Kabupaten	195.030	23.559.299	6,32
12	Kab. Tanah Datar	Kabupaten	388.230	28.777.915	3,86
13	Kota Bukittinggi	Kota	125.020	57.432.491	4,66
14	Kota Padang	Kota	954.180	54.089.952	4,34
15	Kota Padang Panjang	Kota	59.450	50.629.605	5,15
16	Kota Pariaman	Kota	98.340	42.709.782	4,08
17	Kota Payakumbuh	Kota	146.730	35.639.951	5,19
18	Kota Sawahlunto	Kota	68.730	46.498.763	2,21
19	Kota Solok	Kota	79.460	42.358.168	3,02
20	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi	5.836.190	34.167.390	5,92

3.2.4 Perkembangan DAU dan DAK Fisik Kabupaten/Kota 2021–2024

Secara agregat, DAU per kapita riil kabupaten/kota di Sumatera Barat relatif stabil di kisaran sekitar Rp2,47–2,51 juta per kapita sepanjang 2021–2024. Stabilitas ini mencerminkan upaya pemerintah pusat menjaga kapasitas fiskal dasar pemda di tengah dinamika fiskal nasional. Sebaliknya, DAK Fisik per kapita riil cenderung menurun cukup tajam, dari sekitar Rp315 ribu per kapita pada 2021 menjadi sekitar Rp174 ribu per kapita pada 2024. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal dan penajaman prioritas pembiayaan infrastruktur.

Terdapat variasi antardaerah yang lebar, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima DAU dan DAK Fisik per kapita riil tertinggi karena status kepulauan, tertinggal, dan biaya layanan tinggi. Sedangkan Kota Padang menerima DAU dan DAK Fisik per kapita riil yang relatif rendah, tetapi memiliki basis ekonomi dan PAD yang lebih kuat. Variasi besaran TKD per kapita tersebut diduga berkontribusi terhadap perbedaan kemampuan daerah dalam mengejar capaian SPM.

Tabel III. 3 Rata-rata DAU dan DAK Fisik per Kapita Riil Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Menurut Tahun, 2021–2024

Tahun	DAU per kapita riil (Rp)	DAK Fisik per kapita riil (Rp)
2021	2.510.000	315.000
2022	2.510.000	309.000
2023	2.470.000	213.000
2024	2.500.000	174.000

3.2.5 Profil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Sumatera Barat

Indeks SPM komposit kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan lonjakan signifikan pada periode 2021–2024. Rata-rata indeks SPM komposit meningkat dari sekitar 68–69 pada 2021 menjadi di atas 95 pada 2022 dan mendekati 98–99 pada 2023–2024. Hampir seluruh urusan pelayanan dasar mencapai rata-rata di atas 90 persen pada akhir periode. Secara spasial, kota-kota seperti Padang, Agam, Payakumbuh, dan Sawahlunto berada di kelompok atas capaian SPM, sedangkan beberapa kabupaten, termasuk Kepulauan Mentawai dan kabupaten agraris tertentu, sempat tertinggal meski menunjukkan perbaikan cepat.

Tabel III. 4 Daerah dengan Capaian Indeks SPM Komposit Rata-rata di Sumatera Barat 2021–2024

No	Pemda	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Agam	89,98	98,16	100,00	99,84
2	Kabupaten Dharmasraya	79,22	98,12	98,68	99,11
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	39,63	86,98	96,29	93,84
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	46,76	93,63	98,68	98,65
5	Kabupaten Padang Pariaman	62,82	96,99	100,00	97,66
6	Kabupaten Pasaman	73,02	98,49	100,00	99,82
7	Kabupaten Pasaman Barat	58,64	91,63	95,33	94,14
8	Kabupaten Pesisir Selatan	78,08	95,57	96,48	96,60
9	Kabupaten Sijunjung	59,16	96,26	99,70	99,20
10	Kabupaten Solok	61,10	94,48	98,04	99,26
11	Kabupaten Solok Selatan	64,43	96,15	97,35	99,71
12	Kabupaten Tanah Datar	64,82	95,66	96,27	99,72
13	Kota Bukittinggi	57,57	93,63	98,11	97,70
14	Kota Padang	90,22	99,44	100,00	100,00
15	Kota Padang Panjang	71,09	87,32	97,96	99,64
16	Kota Pariaman	60,36	97,17	96,43	99,48
17	Kota Payakumbuh	82,34	97,48	99,92	100,00
18	Kota Sawahlunto	92,41	95,97	97,22	97,46
19	Kota Solok	56,78	89,26	98,41	97,72
20	Provinsi Sumatera Barat	90,65	99,63	99,93	100,00

Secara umum, capaian SPM per urusan wajib pelayanan dasar di Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2021, rata-rata capaian masih moderat, dengan pendidikan sekitar 80 persen dan urusan lain seperti kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, trantibumlinmas, dan sosial masih di kisaran 64–70 persen. Mulai 2022 terjadi lonjakan tajam: pendidikan dan kesehatan rata-rata mendekati 90–95 persen, sementara pekerjaan umum, perumahan, trantibumlinmas, dan sosial naik ke kisaran 94–100 persen. Pada 2023–2024, hampir seluruh urusan SPM rata-rata sudah berada di rentang 94–100 persen, bahkan beberapa seperti perumahan dan sosial secara rata-rata hampir mencapai 100 persen.

Dari sisi spasial, masih terdapat kesenjangan antardaerah. Kota Padang, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Dharmasraya berada pada kelompok dengan rata-rata indeks SPM komposit tertinggi (sekitar 94–97), sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi berada pada kelompok dengan rata-rata lebih rendah (sekitar 79–87). Namun, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan lompatan kinerja yang sangat signifikan: indeks SPM komposit naik dari sekitar 39,6 (2021) menjadi di atas 87 (2022) dan mendekati 96 (2023), sebelum sedikit terkoreksi pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah tertinggal dan berbiaya tinggi pun dapat mempercepat pencapaian SPM ketika didukung pembiayaan dan pembinaan kebijakan yang intensif dan terarah, meskipun keberlanjutannya sangat bergantung pada kapasitas fiskal, termasuk dari TKD. Gambaran deskriptif ini menjadi pijakan penting bagi analisis lanjutan mengenai peran kondisi sosial-ekonomi dan perbedaan DAU serta DAK Fisik per kapita riil terhadap variasi capaian SPM kabupaten/kota di Sumatera Barat.

3.2.6 Kondisi Sosial-Ekonomi: Kemiskinan dan PDRB per Kapita

Setelah pada subbab sebelumnya diuraikan profil pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota di Sumatera Barat, penting untuk melihat konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakangi perbedaan capaian tersebut. Dua indikator utama yang digunakan dalam kajian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita riil dan tingkat kemiskinan. Keduanya menggambarkan, secara berurutan, kapasitas ekonomi rata-rata penduduk di suatu daerah serta tingkat kerentanan penduduk terhadap kemiskinan, yang pada gilirannya memengaruhi kebutuhan layanan dasar dan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan tersebut. Sebagai potret terkini, analisis deskriptif dalam subbab ini menggunakan data tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel III.2.

Dari sisi kapasitas ekonomi, PDRB per kapita riil tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup lebar antardaerah. Rata-rata PDRB per kapita riil pemerintah daerah di Sumatera Barat berada di kisaran sekitar Rp35,7 juta per jiwa per tahun, dengan rentang antara sekitar Rp20,7 juta per jiwa di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai yang terendah hingga sekitar Rp57,4 juta per jiwa di Kota Bukittinggi sebagai yang tertinggi. Secara umum, kelompok kota memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten; rata-rata PDRB per kapita kota berada di kisaran Rp45 juta per jiwa, sedangkan rata-rata kabupaten sekitar Rp29–30 juta per jiwa. Pola ini mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan, sementara sejumlah kabupaten—terutama yang berkarakter agraris

atau terpencil—memiliki kapasitas ekonomi rata-rata penduduk yang relatif lebih rendah.

Dari sisi kemiskinan, kondisi tahun 2024 juga memperlihatkan disparitas yang cukup nyata. Rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sekitar 5,9 persen, dengan rentang antara sekitar 2,21 persen di Kota Sawahlunto sebagai yang terendah hingga 15,30 persen di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai yang tertinggi. Secara agregat, kelompok kota kembali menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik, dengan rata-rata tingkat kemiskinan sekitar 4,4 persen, sementara kabupaten rata-ratanya sekitar 6,9 persen. Kabupaten Kepulauan Mentawai muncul sebagai daerah dengan tantangan kemiskinan paling berat, sedangkan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi, meskipun tidak setinggi Mentawai.

Secara deskriptif, kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan antara kapasitas ekonomi, kemiskinan, dan capaian layanan dasar. Daerah dengan PDRB per kapita relatif tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah—seperti sejumlah kota di Sumatera Barat—umumnya memiliki ruang fiskal dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik untuk mendukung pencapaian SPM. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas ekonomi lebih rendah dan tingkat kemiskinan lebih tinggi, terutama daerah tertinggal dan kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, menghadapi beban ganda: kebutuhan layanan dasar yang besar di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan tantangan geografis. Hal ini sejalan dengan temuan deskriptif sebelumnya bahwa beberapa daerah tersebut, meskipun telah mencatat kemajuan signifikan dalam capaian SPM, masih berada pada kelompok dengan indeks SPM komposit rata-rata yang relatif lebih rendah dibanding daerah lain.

Kondisi sosial-ekonomi yang beragam ini menjadi salah satu alasan penting mengapa kajian ini memasukkan PDRB per kapita riil dan tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol dalam analisis empiris hubungan antara DAU per kapita riil, DAK Fisik per kapita riil, dan capaian SPM. Dengan demikian, pengaruh Dana Transfer ke Daerah terhadap SPM dapat dianalisis dengan lebih hati-hati, dengan mempertimbangkan bahwa sebagian variasi capaian SPM antardaerah juga dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas ekonomi dan tingkat kemiskinan. Subbab berikutnya akan merinci kerangka model empiris yang digunakan untuk menguji hubungan tersebut dalam konteks konsolidasi fiskal dan potensi penyesuaian, termasuk pemotongan, TKD pada APBN 2026.



3.2.7 Gambaran Umum Hasil Empiris

Bagian ini merangkum gambaran umum hasil empiris yang diperoleh dari pengolahan data panel Transfer ke Daerah (TKD), capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta indikator sosial-ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Setelah sebelumnya dipaparkan perkembangan DAU dan DAK Fisik per kapita riil, profil capaian SPM, dan kondisi sosial-ekonomi, subbab ini menyajikan ringkasan temuan deskriptif yang menjadi landasan bagi analisis kuantitatif lebih lanjut pada bab berikutnya.

Secara agregat, capaian SPM di Sumatera Barat menunjukkan perbaikan yang konsisten dan sangat signifikan selama periode 2021–2024. Tidak hanya indeks SPM komposit yang meningkat tajam, tetapi seluruh urusan wajib pelayanan dasar juga mengalami tren kenaikan yang kuat. Rata-rata capaian SPM per urusan menurut tahun di tingkat kabupaten/kota dirangkum berikut ini.

Tabel III. 5 Rata-rata Capaian SPM per Urusan Wajib Menurut Tahun di Sumatera Barat, 2021–2024

Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2021	2022	2023	2024
SPM Pendidikan	81,16	95,33	98,32	98,36
SPM Kesehatan	70,78	89,89	94,95	95,10
SPM Pekerjaan Umum (PU)	68,00	93,96	97,87	99,80
SPM Perumahan Rakyat	66,71	95,50	99,89	99,38
SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas	65,15	96,28	98,46	98,66
SPM Sosial	61,92	99,65	99,95	99,56

Tabel III.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 capaian rata-rata SPM per urusan masih berada pada kisaran 62–81 persen, dengan SPM Pendidikan sudah relatif lebih tinggi (81,16 persen), sedangkan SPM Sosial, Perumahan, dan Trantibumlinmas berada pada level sekitar 62–67 persen. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang sangat tajam di hampir semua urusan, di mana SPM Pendidikan dan Kesehatan masing-masing meningkat menjadi 95,33 persen dan 89,89 persen, sementara empat urusan lainnya (PU, Perumahan, Trantibumlinmas, dan Sosial) naik ke kisaran 93,96–99,65 persen. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian rata-rata SPM per urusan secara umum sudah berada pada level di atas 94 persen, dengan beberapa urusan (Perumahan, Sosial, PU) praktis mendekati 100 persen.

Secara deskriptif, pola ini sejalan dengan gambaran pada Subbab 3.9 bahwa indeks SPM komposit meningkat dari sekitar 68,95 pada tahun 2021 menjadi 95,10 pada tahun 2022, lalu mencapai 98,24 pada 2023 dan 98,48 pada 2024. Artinya, dari perspektif rata-rata, kabupaten/kota di Sumatera Barat telah berhasil mengejar pemenuhan SPM dalam waktu relatif singkat. Namun, sebagaimana telah dibahas, masih terdapat variasi penting antardaerah: beberapa kabupaten/kota secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi, sementara daerah lain—khususnya dengan kapasitas fiskal lebih terbatas dan

tingkat kemiskinan yang lebih tinggi—baru mencapai pemenuhan SPM secara bertahap.

Jika dikaitkan dengan hasil deskriptif, terlihat bahwa kapasitas fiskal yang tercermin dari DAU dan DAK Fisik per kapita riil, serta kondisi sosial-ekonomi (PDRB per kapita dan kemiskinan), tidak serta-merta berbanding lurus secara sederhana dengan capaian SPM. Beberapa daerah dengan DAU dan DAK Fisik per kapita tinggi justru masih berproses mengejar SPM karena karakteristik kewilayahan yang menantang (misalnya daerah kepulauan dan terpencil), sementara sejumlah kota dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi mampu mencapai SPM yang relatif baik meskipun menerima TKD per kapita yang lebih rendah. Gambaran ini mengindikasikan bahwa desain TKD yang bersifat equalizing dan fungsi kebijakan lainnya perlu diperhitungkan secara hati-hati ketika menilai hubungan antara TKD dan SPM.

Dengan demikian, gambaran umum hasil empiris pada bab ini menegaskan dua hal utama. Pertama, secara rata-rata, pemenuhan SPM di Sumatera Barat telah mengalami akselerasi yang sangat signifikan dalam periode 2021–2024 di semua urusan wajib pelayanan dasar. Kedua, di balik capaian rata-rata tersebut, masih terdapat variasi spasial dan heterogenitas kondisi fiskal-sosial yang perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, sub bab berikutnya akan menyajikan analisis kuantitatif menggunakan model data panel untuk menguji secara lebih sistematis bagaimana DAU per kapita riil dan DAK Fisik per kapita riil, dengan mengontrol PDRB per kapita, kemiskinan, dan karakteristik daerah lainnya, berpengaruh terhadap capaian SPM di Sumatera Barat, terutama dalam konteks agenda konsolidasi fiskal dan potensi pemotongan TKD pada APBN 2026.

3.2.8 Hasil Estimasi Model Panel Utama

Untuk menganalisis pengaruh Transfer ke Daerah terhadap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), digunakan model regresi panel dengan efek tetap daerah dan tahun (*two-way fixed effects*). Variabel dependen adalah indeks SPM komposit kabupaten/kota di Sumatera Barat periode 2021–2024. Variabel penjelas utama mencakup DAU per kapita riil, interaksi DAU dengan dummy periode pascareformasi DAU *specific grant* (2023–2024), dan DAK Fisik per kapita riil. Sebagai variabel kontrol dimasukkan tingkat kemiskinan dan PDRB riil per kapita, sementara efek tetap daerah dan tahun menangkap karakteristik struktural yang tidak teramati dan guncangan umum per tahun. Ringkasan hasil estimasi model panel utama disajikan pada tabel III.6.



Tabel III. 6 Hasil Estimasi Model Panel Pengaruh DAU dan DAK Fisik terhadap Indeks SPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 2021–2024

Variabel	Koefisien	(Standar error)
DAU per kapita riil (juta Rp/kapita)	3,141	(2,403)
Interaksi DAU × dummy pascareform	2,637	(1,534)
DAK Fisik per kapita riil (juta Rp/kapita)	0,777	(11,806)
Tingkat kemiskinan (%)	-8,248	(9,342)
PDRB riil per kapita (juta Rp/kapita)	-2,044	(2,750)
Efek tetap daerah	Ya	
Efek tetap tahun	Ya	
Jumlah observasi (N)	80	
R-squared	0,850	
Variabel dependen: Indeks SPM komposit (0–100); metode: two-way fixed effects		

Secara umum, model ini memiliki daya jelaskan yang kuat dengan *R-squared* sebesar 0,850, yang berarti sekitar 85 persen variasi indeks SPM komposit dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel fiskal, sosial-ekonomi, dan efek tetap daerah–tahun. Koefisien DAU per kapita riil bernilai positif (3,141), dan diperkuat oleh koefisien interaksi DAU × *dummy pascareform* yang juga positif (2,637). Ini mengindikasikan bahwa peningkatan DAU per kapita riil berkorelasi dengan peningkatan indeks SPM komposit, dan bahwa pengaruh DAU cenderung lebih kuat pada periode pascareformasi DAU *specific grant* (2023–2024) dibandingkan periode sebelumnya. Sebaliknya, DAK Fisik per kapita riil berkoefisien positif namun sangat kecil relatif terhadap standar error, sehingga dalam spesifikasi agregat ini belum tampak hubungan yang jelas antara variasi DAK Fisik per kapita dan indeks SPM komposit.

Koefisien tingkat kemiskinan bertanda negatif (–8,248) sesuai dengan ekspektasi bahwa daerah dengan kemiskinan lebih tinggi menghadapi tantangan lebih besar dalam pemenuhan layanan dasar, sementara koefisien PDRB per kapita riil juga negatif (–2,044) dan relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dikendalikan dengan DAU, DAK Fisik, serta efek tetap daerah dan tahun, variasi jangka pendek PDRB per kapita dan kemiskinan tetap relevan sebagai konteks, tetapi banyak perbedaan struktural antar daerah telah terserap oleh efek tetap. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan pentingnya DAU sebagai penopang utama pembiayaan layanan dasar, serta memberi sinyal bahwa desain DAU yang lebih terarah (*specific grant*) berpotensi memperkuat keterkaitan antara kebijakan TKD dan pencapaian SPM, yang perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan konsolidasi fiskal dan pemotongan TKD pada APBN 2026.

3.2.9 Perubahan Pengaruh DAU sebelum dan Sesudah DAU *Specific Grant*

Analisis model panel dengan interaksi antara DAU per kapita riil dan *dummy* pascareformasi DAU *specific grant* (2023–2024) menunjukkan bahwa reformasi DAU memperkuat keterkaitan antara DAU dan capaian SPM. Pada periode prareformasi (2021–2022), setiap kenaikan Rp1 juta per kapita DAU riil berkorelasi dengan kenaikan indeks SPM komposit sekitar 3,14 poin, sedangkan pada periode pascareformasi pengaruh totalnya meningkat menjadi sekitar 5,78 poin. Hal ini konsisten dengan desain DAU *specific grant* yang mengikat sebagian DAU pada pembiayaan layanan dasar, sehingga tambahan kapasitas fiskal dari DAU semakin terkait langsung dengan *output* SPM.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi rencana konsolidasi fiskal dan pemotongan TKD dalam APBN 2026. Karena pengaruh DAU terhadap SPM pascareformasi menjadi lebih kuat, pemotongan DAU berpotensi menurunkan kemampuan daerah mempertahankan capaian SPM, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada DAU dan berkapasitas fiskal rendah. Ke depan, desain DAU dan kebijakan penyesuaian TKD perlu lebih selektif dan berbasis evidensi, misalnya dengan mempertahankan atau memperkuat porsi DAU yang terkait langsung layanan dasar pada daerah lemah, sambil melakukan penyesuaian lebih besar pada komponen yang kurang terkait SPM atau pada daerah dengan kapasitas fiskal lebih kuat. Dengan demikian, DAU pascareformasi tidak hanya berfungsi sebagai penopang fiskal umum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan layanan dasar yang harus dijaga perannya dalam proses konsolidasi fiskal.

3.2.10 Peran Karakteristik Fiskal dan Sosial-Ekonomi Daerah

Hasil estimasi model panel pada Subbab 3.12 menunjukkan bahwa selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, karakteristik fiskal dan sosial-ekonomi daerah turut memengaruhi variasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota di Sumatera Barat. Karakteristik ini direpresentasikan antara lain oleh tingkat kemiskinan dan PDRB riil per kapita, sementara efek tetap daerah menyerap faktor struktural lain yang tidak terukur secara eksplisit, seperti kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan kondisi geografis.

Secara teoritis, kemiskinan yang lebih tinggi mencerminkan beban layanan dasar yang lebih besar dan tantangan lebih berat dalam pemenuhan SPM. Koefisien tingkat kemiskinan bertanda negatif dan searah dengan ekspektasi, namun tidak signifikan secara statistik setelah dikendalikan pengaruh DAU, DAK Fisik, PDRB per kapita, serta efek tetap daerah dan tahun. Demikian pula, PDRB riil

per kapita memiliki koefisien negatif yang kecil dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan struktural jangka panjang antardaerah (misalnya perbedaan antara kota dan kabupaten atau wilayah pesisir dan kepulauan terpencil) lebih banyak tertangkap oleh efek tetap daerah daripada oleh variasi tahunan PDRB dan kemiskinan.

Di luar variabel yang secara eksplisit masuk ke dalam model, karakteristik fiskal lain seperti kapasitas PAD, indeks kapasitas fiskal, dan tingkat ketergantungan terhadap TKD juga penting secara konseptual. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan ketergantungan rendah pada TKD memiliki ruang lebih besar untuk menjaga layanan dasar ketika terjadi penyesuaian TKD, sementara daerah dengan kapasitas fiskal lemah dan sangat bergantung pada DAU/DAK jauh lebih rentan terhadap penurunan layanan saat ruang fiskal menyempit. Kombinasi hasil empiris dan gambaran deskriptif mengindikasikan bahwa DAU dan DAK Fisik tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh interaksi dengan karakteristik fiskal dan sosial-ekonomi daerah.

Dalam konteks konsolidasi fiskal dan potensi pemotongan TKD pada APBN 2026, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis karakteristik daerah (*differentiated approach*). Pemotongan TKD yang proporsional dan seragam berisiko menimbulkan dampak yang tidak seimbang, karena daerah miskin, tertinggal, dan sangat bergantung pada TKD akan menanggung konsekuensi lebih berat terhadap pemenuhan SPM dibanding daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Dengan demikian, parameter seperti tingkat kemiskinan, kapasitas fiskal, dan status kewilayahan (terpencil, kepulauan, perbatasan) perlu dipertimbangkan dalam desain penyesuaian TKD agar konsolidasi fiskal tetap sejalan dengan komitmen pemenuhan layanan dasar dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Temuan ini menjadi dasar bagi pembahasan kebijakan pada bab berikutnya, termasuk rekomendasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.

3.2.11 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk menguji ketahanan hasil estimasi model panel yang mengaitkan DAU per kapita riil, DAK Fisik per kapita riil, dan karakteristik sosial-ekonomi dengan indeks SPM komposit kabupaten/kota di Sumatera Barat periode 2021–2024. Pengujian mencakup variasi spesifikasi model (penyertaan/penghilangan variabel kontrol, bentuk non-linear), perlakuan terhadap *outlier* (misalnya pengecualian Mentawai dan penambahan *dummy* kepulauan/terpencil), perubahan bentuk fungsional variabel fiskal (level vs log), serta penggunaan metode estimasi alternatif (*fixed effects*, *random effects*, dan *pooled OLS* dengan *cluster SE*).

Secara konsisten, DAU per kapita riil berasosiasi positif dengan indeks SPM komposit, dengan pengaruh yang menguat pada periode pascareformasi DAU *specific grant*, sementara DAK Fisik per kapita riil tidak menunjukkan hubungan yang stabil dan signifikan pada tingkat agregat, dan sebagian pengaruh variabel sosial-ekonomi terserap oleh efek tetap daerah. Robustnya temuan ini terhadap berbagai uji sensitivitas menegaskan bahwa DAU berfungsi sebagai instrumen kunci pemenuhan layanan dasar, sehingga dalam konteks konsolidasi fiskal dan rencana pemotongan TKD pada APBN 2026, penyesuaian DAU perlu dirancang secara hati-hati dan berbasis bukti empiris agar tidak menggerus capaian SPM.

3.2.12 Diskusi dan Implikasi Kebijakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara TKD (khususnya DAU dan DAK Fisik) dengan capaian SPM di Sumatera Barat bersifat kompleks. Secara deskriptif, capaian SPM melonjak tajam pada 2021–2024, namun analisis panel menegaskan bahwa DAU per kapita riil berperan lebih kuat terhadap indeks SPM komposit, terutama setelah reformasi DAU *specific grant*, sementara pengaruh DAK Fisik belum tampak signifikan pada tingkat agregat karena dampaknya lebih sektoral dan berjangka panjang. Efektivitas TKD sangat ditentukan oleh karakteristik fiskal, sosial-ekonomi, dan kelembagaan tiap daerah, sehingga kebijakan TKD yang seragam berisiko mengabaikan keragaman konteks lokal, khususnya bagi daerah miskin, berkapasitas fiskal lemah, dan sangat bergantung pada transfer (sekitar 70 persen pendapatan).

Dalam konteks APBN 2026 dan agenda konsolidasi fiskal, pemotongan DAU tidak dapat dipandang sekadar penyesuaian nominal karena DAU kini semakin “mengandung” muatan layanan dasar; pemotongan merata berpotensi mengganggu kemampuan daerah mempertahankan dan meningkatkan SPM. Diperlukan pendekatan TKD yang berdiferensiasi berbasis risiko, kapasitas fiskal, kemiskinan, tipologi wilayah, dan kinerja SPM, diiringi penguatan penganggaran berbasis kinerja dan kualitas belanja di daerah agar DAU dan DAK Fisik benar-benar terhubung dengan target SPM.

Bagi Kanwil DJPb Sumatera Barat, temuan ini mempertegas peran TREFA untuk memperkuat dialog kebijakan dengan pemda, *membangun early warning system* atas risiko penurunan layanan dasar, dan memberi masukan teknis ke pusat. Secara keseluruhan, DAU dan DAK Fisik perlu diposisikan sebagai instrumen kebijakan layanan dasar, sehingga konsolidasi fiskal harus dirancang hati-hati agar keberlanjutan fiskal tercapai tanpa mengorbankan pemenuhan SPM, sekaligus mendorong arsitektur TKD yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi kinerja.



BAB IV

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Filosofi Tari Piring adalah ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, kerja keras petani, dan kebersamaan dalam masyarakat Minangkabau. Tarian ini juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong dan keharmonisan bermasyarakat. Tari Piring juga melambangkan betapa kayanya agrikultur Minangkabau sebagai lumbung pangan Sumatera.

Foto: Erison J Kambari

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Barat hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian positif dalam perluasan cakupan dan peningkatan partisipasi satuan pendidikan, namun masih menghadapi sejumlah isu strategis dalam implementasinya. Secara umum pelaksanaan Program MBG dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kinerja Pelaksanaan dan Dampak Harga
Pelaksanaan Program MBG di Sumatera Barat hingga Triwulan III-2025 menunjukkan perluasan cakupan dan meningkatnya partisipasi sekolah. Namun, permintaan serentak terhadap bahan pangan lokal seperti beras, telur, dan daging ayam memunculkan tekanan pada rantai pasok, terutama di daerah jauh dari pusat distribusi. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga dan mendorong peningkatan IHK kelompok makanan-minuman di beberapa kabupaten/kota sejak Juli–September 2025.
 - b. Tantangan Tata Kelola dan Koordinasi
Tata kelola program masih menghadapi hambatan, khususnya terkait sinkronisasi antarinstitusi seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dan penyedia pangan lokal. Laporan mengenai keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian menu dengan ketersediaan bahan, serta mekanisme administrasi dan pelaporan yang belum seragam menjadi faktor yang menurunkan efektivitas implementasi, terutama di daerah dengan kapasitas manajerial yang masih terbatas.
 - c. Ketimpangan Wilayah dan Kebutuhan Penguatan Sistem
Terdapat kesenjangan efektivitas program antarwilayah: daerah perkotaan relatif lebih siap dari sisi pengadaan dan distribusi, sementara wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti Pasaman Barat dan Dharmasraya masih terkendala logistik dan fasilitas penyimpanan. Diperlukan penguatan manajemen rantai pasok lokal, peningkatan kapasitas pelaksana daerah, dan pembangunan sistem *monitoring* terpadu.
2. Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, secara khusus dalam konteks pemotongan TKD tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Pemotongan TKD, terutama DAU, tidak netral terhadap layanan dasar, karena DAU telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan SPM, khususnya setelah diberlakukannya skema DAU *specific grant*.
 - a. Mengingat sekitar 70 persen pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer, pemotongan TKD yang tidak memperhitungkan capaian dan kebutuhan SPM berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah dan

melemahkan kemampuan pemda dalam mempertahankan, apalagi meningkatkan, kualitas layanan dasar.

- b. Kebijakan pemotongan TKD dalam APBN 2026 idealnya menerapkan pendekatan berbasis risiko dan kapasitas fiskal, dengan memberikan perlindungan relatif lebih besar kepada daerah yang masih berjuang mengejar SPM dan sangat bergantung pada TKD, sembari mendorong daerah dengan kapasitas fiskal kuat untuk lebih mengoptimalkan PAD dan efisiensi belanja.

4.2 Rekomendasi

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program nasional yang telah dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo. Untuk Kuartal III dan IV 2025 ini, Program ini dapat dianggap sebagai penggerak perekonomian daerah dan nasional. Beberapa permasalahan yang akan muncul dari sisi fiskal adalah MBG hanya menjadi substitusi transfer dari rumah tangga ke pemerintah jika pengelolaan MBG dilakukan secara sentralistis. MBG dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi jika pelaksanaan program tersebut didesentralisasikan ke masing-masing daerah terutama di Kabupaten dan Kota. Pengelolaan MBG harus berbasis komunitas dalam masyarakat agar aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi berkembang.
2. Sinergi MBG dan Koperasi Merah Putih. Guna memberikan dampak yang besar MBG terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pengelolaan MBG dapat disinergikan dalam penyediaan kebutuhan logistik MBG dengan melakukan kerja sama kegiatan dengan Koperasi Merah Putih. Jika hal ini dilakukan oleh pemerintah maka aktivitas ekonomi dan *velocity of money* juga terjadi dalam masyarakat. Pengadaan logistik dan aktivitas penunjang MBG dapat mendorong aktivitas perekonomian daerah secara keseluruhan.
3. Perlunya antisipasi kelangkaan bahan pokok dan kenaikan harga pangan karena tingginya permintaan dari SPPG yang menguras stok di pasar. Hal ini karena SPPG membeli sebagian besar bahan baku dari produk pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, sehingga pasokan di pasar berkurang dan menyebabkan kenaikan harga
4. Berdasarkan hasil analisis empiris dan kesimpulan terkait penguatan peran DAU terhadap pencapaian SPM dan rencana konsolidasi fiskal melalui pemotongan TKD dalam APBN 2026, rekomendasi kebijakan berikut disusun dengan fokus pada tiga level utama: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.
 1. Rekomendasi bagi Pemerintah Pusat
 - a) Merancang pemotongan TKD secara selektif dan berbasis risiko layanan dasar Pemotongan TKD, khususnya DAU, sebaiknya tidak dilakukan secara rata untuk seluruh daerah. Pemerintah pusat perlu



menggunakan indikator kemiskinan, indeks kapasitas fiskal, ketergantungan TKD, status kepulauan/terpencil, dan capaian SPM sebagai dasar menentukan kedalaman penyesuaian. Daerah yang rentan perlu mendapat perlindungan relatif dari pemotongan yang terlalu dalam.

- b) Memperkuat desain DAU yang berorientasi pada SPM tanpa mengurangi fleksibilitas daerah Penguatan fungsi layanan dasar dalam DAU perlu diimbangi dengan ruang inovasi daerah. Komponen DAU yang terkait langsung layanan dasar dapat “dilindungi” (*ring-fenced*) dari pemotongan terlalu besar, sementara penyesuaian lebih diarahkan pada komponen yang tidak terkait langsung dengan SPM.
 - c) Menajamkan fokus DAK Fisik untuk mendukung indikator SPM sektoral Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa menu DAK Fisik selaras dengan indikator sektor SPM (misalnya infrastruktur pendidikan, kesehatan, air bersih, dan permukiman). Evaluasi DAK Fisik perlu diperkuat dengan indikator *output* dan *outcome* yang lebih spesifik, bukan hanya melalui SPM agregat.
2. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah
- a) Memprioritaskan belanja pada urusan layanan dasar SPM Pemerintah daerah perlu menata ulang prioritas APBD agar belanja yang berkaitan langsung dengan SPM mendapatkan porsi memadai, khususnya di tengah penyesuaian TKD. Belanja yang kurang mendukung prioritas dapat diefisienkan.
 - b) Memperkuat penganggaran berbasis kinerja dan pengelolaan data SPM Penganggaran berbasis kinerja dengan indikator kinerja yang jelas dan sistem pelaporan SPM yang andal penting untuk memastikan setiap rupiah belanja memberi dampak terhadap layanan dasar. Kualitas data SPM juga harus dijaga agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan advokasi kepada pemerintah pusat.
 - c) Meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja Di tengah pemotongan TKD, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber PAD yang berpotensi tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, sekaligus melakukan efisiensi belanja nonprioritas untuk menjaga ruang fiskal layanan dasar.
3. Rekomendasi bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.
- a) Memperkuat fungsi *advisory* (TREFA) terkait dampak pemotongan TKD terhadap SPM, Kanwil DJPb dapat menggunakan hasil kajian ini sebagai dasar memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah pusat dan



fasilitasi dialog dengan pemerintah daerah, khususnya terkait risiko pemotongan TKD terhadap layanan dasar.

- b) Mengembangkan analisis dan *dashboard* pemantauan integratif TKD–SPM Penyusunan *dashboard* yang mengintegrasikan data TKD (DAU, DAK Fisik), indikator sosial-ekonomi, dan capaian SPM per daerah akan membantu deteksi dini potensi penurunan layanan dasar. *Dashboard* ini dapat menjadi alat *monitoring* dan komunikasi kebijakan.
- c) Mendorong penguatan tata kelola dan kualitas belanja daerah melalui forum koordinasi dan asistensi teknis, Kanwil DJPb dapat mendorong perbaikan perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah, terutama yang terkait SPM, serta mendukung pemda dalam mengaitkan TKD dengan *outcome* layanan dasar.
- d) Menjadikan hasil kajian sebagai bahan advokasi dan pembelajaran berkelanjutan. Hasil kajian ini dapat diposisikan sebagai *living document* yang diperbarui seiring perkembangan data dan kebijakan TKD, serta dimanfaatkan sebagai bahan advokasi kebijakan, bahan diskusi teknis, dan referensi dalam penguatan fungsi TREFA di Sumatera Barat.



DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2025). *Survei Konsumen September 2025*. Jakarta: Bank Indonesia
- BPS. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2025). *Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia Agustus 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Agustus 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2025). *Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat Tinjauan Produk Domestik regional Bruto Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2020–2024*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2025). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Agustus 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Juli 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen September 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Sumatera Barat Agustus 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2025). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Sumatera Barat Juli 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2025). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Sumatera Barat September 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2025). *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Beras di Penggilingan Agustus 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Beras di Penggilingan Juli 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Beras di Penggilingan September 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Provinsi Sumatera Barat Agustus 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- BPS. (2025). *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Provinsi Sumatera Barat Juli 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.



BPS. (2025). *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Provinsi Sumatera Barat September 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

BPS. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan III-2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

BPS. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang menurut Lapangan Usaha*. Padang: Badan Pusat Statistik Kota Padang

BPS. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2025). *Profil Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, Maret 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

BPS. (2025). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2025). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Sumatera Barat, Maret 2025*. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

<https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sekda/StatistikRegional.aspx?idprov=13>





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kanwil DJPb Sumbar

ambd

amanah, melayani, berakhlak, optimis



<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar>



@djpsumbar



Kanwil DJPb Sumatera Barat



Kanwil DJPb Sumbar



Jl. Khatib Sulaiman No. 3, Kota Padang



(0751) 7054731